



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)



Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INSPEKTORAT

Jl. Jend. Sudirman KM. 6,3 Sampit 74322 Telp. (0531) 21082, fax30374,
Email: inspektorat@kotimkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sampit, 10 Februari 2021

Pt. Inspektur,



Masri, S.E.
Pembina Tk. I

NIP. 19651022 199401 1 008



KATA PENGANTAR

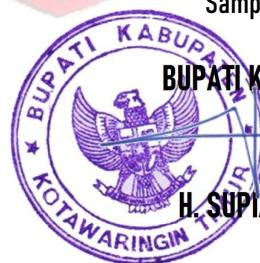


Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan secara umum (permasalahan utama / *strategic issued*), perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja (capaian kinerja, faktor - faktor keberhasilan dan kegagalan, alternatif solusi, analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya, analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dan realisasi anggaran), kesimpulan dan rencana aksi (*action plan*) tahun berikutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak terlepas dari peran dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah kabupaten. Untuk itu kami ucapkan rasa syukur tak terhingga kehadiran Allah SWT dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan sumbang saran, data dan informasi sehingga laporan kinerja ini dapat diselesaikan. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat, dapat dijadikan umpan balik (*feed back*) dan sebagai *booster* perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, demi mencapai atau mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sampit, 10 Pebruari 2021



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

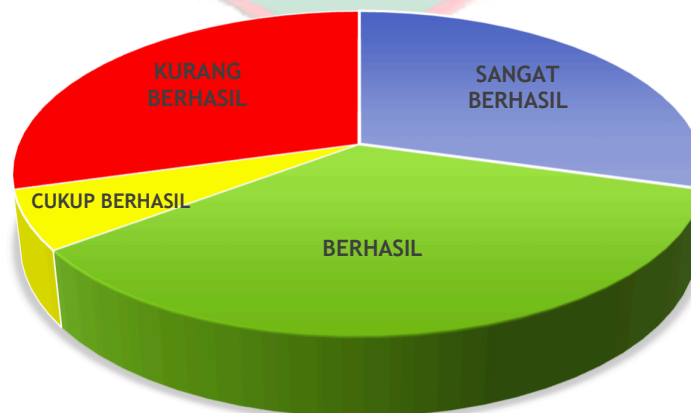
H. SUPIAN HADI, S.Ikom.,ME



IKHTISAR EKSEKUTIF

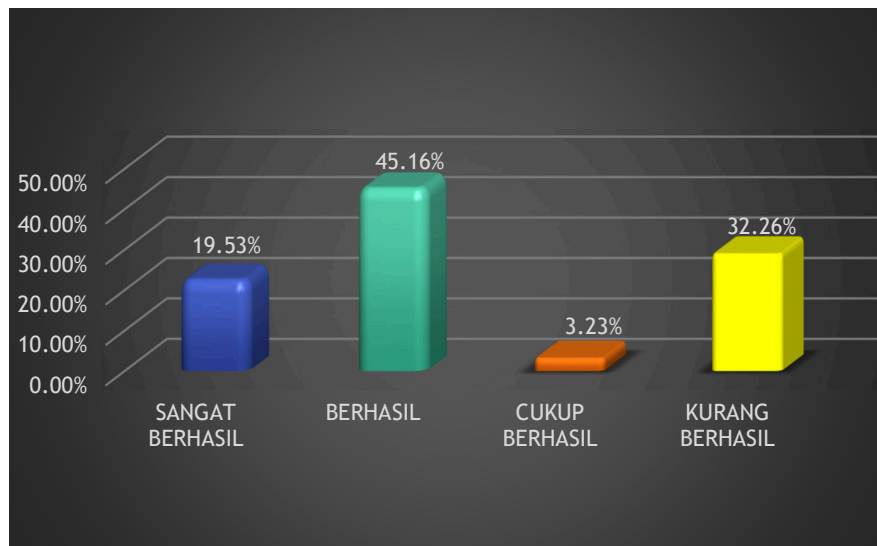


Dari 19 (sembilan belas) sasaran strategis atau sasaran kinerja yang diukur, 4 (empat) di antaranya masuk predikat **Sangat Berhasil** (23,53 %) dan 6 (enam) di antaranya masuk predikat **Berhasil** (35,29 %) dan 1 (satu) sasaran masuk predikat **Cukup Berhasil** (5,88 %) dan 6 (enam) sasaran masuk predikat **Kurang Berhasil** (35,29 %). Total rata - rata pencapaian sasaran tahun 2020 adalah **111,68 %** atau masuk predikat **Sangat Berhasil**. Perlu disampaikan, bahwa dari 19 sasaran strategis tersebut di atas, ada 2 (dua) **sasaran** belum bisa diukur karena realisasi capaian indikatornya belum diterbitkan atau belum dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Diperkirakan angka realisasi tersebut baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021 berjalan. Dengan demikian yang bisa diukur hanya 17 (tujuh belas) sasaran kinerja saja dan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja.





Dari 37 (tiga puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, hanya ada 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) saja yang bisa diukur. Di antaranya, ada 6 (enam) indikator masuk predikat **Sangat Berhasil (19,53 %)**, 14 (empat belas) indikator masuk predikat **Berhasil (45,16 %)**, 1 (satu) indikator masuk predikat **Cukup Berhasil (3,23 %)** dan 10 (sepuluh) indikator masuk predikat **Kurang Berhasil (32,26 %)**.



Dalam upaya mencapai 19 (sembilan) sasaran strategis, 37 Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Kecamatan, dianggarkan melalui Belanja Langsung APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 980.645.820.693,00** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp. 702.910.011.762,78** atau sebesar **71,68 %**. Sedangkan realisasi dana yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebesar **Rp 222.486.025.034,00** atau mencapai **75,76 %** dari total realisasi belanja langsung APBD Tahun 2020.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kondisi Umum	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	9
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran	13
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
C. Perjanjian Kinerja (PK)	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Indikator dan Pengukuran Kinerja	21
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
C. Akuntabilitas Keuangan	109
D. Prestasi dan Penghargaan	125
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Strategi Peningkatan Kinerja	126
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Timur	15
Tabel 2.2	: Perjanjian Kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.....	17
Tabel 2.3	: Rencana Belanja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	19
Tabel 2.4	: Alokasi Belanja Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2020.....	20
Tabel 3.1	: Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
Tabel 3.2	: Pengukuran Kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	27
Tabel 3.3	: Predikat Rata – Rata Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.....	30
Tabel 3.4	: Capaian Keberhasilan Sasaran Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	31
Tabel 3.5	: Pengukuran Capaian Strategis 1	32
Tabel 3.6	: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	34
Tabel 3.7	: Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	34
Tabel 3.8	: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	35
Tabel 3.9	: Pengukuran Capaian Strategis 2	36
Tabel 3.10	: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	37
Tabel 3.11	: Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2017-2020	38
Tabel 3.12	: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	39
Tabel 3.13	: Pengukuran Capaian Strategis 3	40
Tabel 3.14	: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	41
Tabel 3.15	: Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	41
Tabel 3.16	: Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	42



Tabel 3.17 : Pengukuran Capaian Strategis 4	42
Tabel 3.18 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	44
Tabel 3.19 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	45
Tabel 3.20 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	45
Tabel 3.21 : Pengukuran Capaian Strategis 5	46
Tabel 3.22 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	49
Tabel 3.23 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	50
Tabel 3.24 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	51
Tabel 3.25 : Pengukuran Capaian Strategis 6	52
Tabel 3.26 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	54
Tabel 3.27 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	54
Tabel 3.28 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	55
Tabel 3.29 : Pengukuran Capaian Strategis 7	56
Tabel 3.30 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	57
Tabel 3.31 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	58
Tabel 3.32 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	59
Tabel 3.33 : Pengukuran Capaian Strategis 8	59
Tabel 3.34 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	62
Tabel 3.35 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	62
Tabel 3.36 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	63
Tabel 3.37 : Pengukuran Capaian Strategis 9	63



Tabel 3.38 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	65
Tabel 3.39 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	66
Tabel 3.40 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	66
Tabel 3.41 : Pengukuran Capaian Strategis 10	67
Tabel 3.42 : Tabel Angka dan Katagori Indeks Standar Pencemaran Udara (I S P U)	68
Tabel 3.43 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	69
Tabel 3.44 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2016-2019	70
Tabel 3.45 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	71
Tabel 3.46 : Pengukuran Capaian Strategis 11	72
Tabel 3.47 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	74
Tabel 3.48 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	74
Tabel 3.49 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	75
Tabel 3.50 : Pengukuran Capaian Strategis 12	76
Tabel 3.51 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	78
Tabel 3.52 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	78
Tabel 3.53 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	79
Tabel 3.54 : Pengukuran Capaian Strategis 13	80
Tabel 3.55 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	82
Tabel 3.56 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	82
Tabel 3.57 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	83
Tabel 3.58 : Pengukuran Capaian Strategis 14	83



Tabel 3.59 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	86
Tabel 3.60 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	87
Tabel 3.61 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	88
Tabel 3.62 : Pengukuran Capaian Strategis 15	89
Tabel 3.63 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	91
Tabel 3.64 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	92
Tabel 3.65 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	92
Tabel 3.66 : Pengukuran Capaian Strategis 16	93
Tabel 3.67 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	95
Tabel 3.68 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	96
Tabel 3.69 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	96
Tabel 3.70 : Pengukuran Capaian Strategis 17	97
Tabel 3.71 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	99
Tabel 3.72 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2022	100
Tabel 3.73 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	101
Tabel 3.74 : Pengukuran Capaian Strategis 18	102
Tabel 3.75 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	105
Tabel 3.76 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2020-2024	105
Tabel 3.77 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2024	106
Tabel 3.78 : Pengukuran Capaian Strategis 19	106
Tabel 3.79 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Akhir Periode RPJMD Tahun 2019	108



Tabel 3.80 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Standar / Target RPJMN Tahun 2016-2019	109
Tabel 3.81 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 - 2020	109
Tabel 3.82 : Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020	113
Tabel 3.83 : Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	116
Tabel 3.84 : Pencapaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	121
Tabel 3.85 : Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Tahun 2020	122
Tabel 3.86 : Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020	124





BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Implementasi pemerintahan daerah dengan berbagai bentuk dan wujudnya, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara komprehensif. Upaya ini dilakukan melalui akselerasi pelayanan, progresifitas pelayanan, pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat, serta meningkatkan kemampuan kompetisi daerah dengan tidak mengabaikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kearifan lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek - aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, menggali potensi dan keanekaragaman daerah, serta mencermati peluang dan tantangan persaingan global. Otonomi daerah adalah pintu gerbang sekaligus jawaban yang tepat untuk mewujudkan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI. Melalui otonomi daerah, diharapkan dapat membuka gerbang kesempatan, kewenangan, keleluasaan dan kemandirian bagi Pemerintah Daerah.

Dalam konteks tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), berdaya guna, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini searah dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.



Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan dilaporkan secara periodik. Pelaporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati / Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam konteks tersebut di atas dan berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021, telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017 - 2021 yang sudah direvisi, menyesuaikan dengan perubahan RPJMD dimaksud. Berangkat dari kondisi tersebut, penyusunan LKIP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020. LKIP Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020, berisi berbagai upaya pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan (RKPD dan sebagainya). Penyajian pencapaian sasaran kinerja, dikemas dalam bentuk informasi pengukuran realisasi pencapaian sasaran indikator kinerja strategis, pencapaian sasaran RPJMD dan perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja. Dengan disusunnya LKIP ini, akan memberikan informasi kemajuan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur sepanjang tahun 2020 kepada Presiden melalui Kementerian terkait (Kemenpan dan RB, Kemendagri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Gubernur Kalimantan Tengah).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 ini antara lain :

1. Untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan benar, berdasarkan peraturan / ketentuan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
2. Untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
3. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
4. Untuk bahan atau sebagai dasar pengambilan keputusan / kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun berikutnya ;



5. Sebagai umpan balik (*feed back*) bagi pihak - pihak yang berkepentingan, dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, guna mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 ini antara lain :

1. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, lingkungan yang aman, tertib dan kondusif ;
2. Terwujudnya suatu alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat, jelas, terukur dan formal ;
3. Terwujudnya kepercayaan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik ;
4. Terhimpunnya berbagai informasi kinerja Perangkat Daerah (PD) yang krusial dan diperlukan dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Kondisi Umum

1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kabupaten Kotawaringin Timur adalah daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tugas Pokok Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tugas pokok Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas - tugas desentralisasi di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Tugas pokok tersebut dijabarkan lagi ke dalam tugas pokok Perangkat Daerah (PD), dengan tujuan untuk mengakomodir dan merealisasi berbagai aspirasi yang representatif, transparansi, profesional, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel.

Tugas pokok Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

a) Sekretariat Daerah (SETDA).

Sekretariat Daerah (SETDA), mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah.



b) **Sekretariat DPRD (SETWAN).**

Sekretariat DPRD (SETWAN), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c) **Inspektorat Kabupaten.**

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

d) **Dinas Daerah.**

Secara umum, Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tugasnya masing - masing, sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

e) **Badan Daerah.**

Secara umum, Badan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai bidang tugasnya masing - masing.

f) **Kecamatan.**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

g) **Kelurahan.**

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan.

3. **Isu - Isu Strategis (Strategic Issue).**

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur (Tahun 2016 - 2021) memiliki nilai strategis sebagai dokumen perencanaan. RPJMD merupakan pedoman atau acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) masing - masing. RPJMD bersifat indikatif dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kotawaringin Timur terpilih (H.Supian Hadi, S.Kom.,ME dan Drs.H.M. Taufiq Mukri, SH.,MM), yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.

Sesuai dengan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan yang signifikan dan berkembang di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta mengacu pada janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telah ditetapkan 9 (sembilan) isu strategis yang merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan (RPJMD), sebagai berikut :



- (1) Infrastruktur ;
- (2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat ;
- (3) Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya ;
- (4) Ketahanan pangan ;
- (5) Penguatan Pemerintahan Desa ;
- (6) Pemberdayaan ekonomi ;
- (7) Pelestarian lingkungan hidup ;
- (8) Penanggulangan bencana ;
- (9) Pariwisata dan pelestarian budaya.

Infrastruktur.

Penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur tersebut meliputi jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, irigasi, penataan kota, pengelolaan limbah / sampah, perumahan, pemakaman, transportasi dan lain - lain.

Kondisi infrastruktur, terutama jalan di dalam Kota Sampit dan dalam Ibu Kota Kecamatan belum semuanya dalam kondisi baik. Masih terdapat Desa yang belum terhubung dengan jalan darat, baik oleh roda dua maupun roda empat. Hal lainnya, adanya kawasan kumuh di kawasan perkotaan akibat perkembangan penduduk dan berkembangnya kawasan permukiman. Hal ini berdampak pula terhadap masalah penyediaan air bersih yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam konteks penyediaan transportasi, sampai dengan saat ini, belum semua terminal yang berada di Kecamatan berfungsi dengan baik. Sementara itu, di bidang komunikasi, sampai dengan akhir tahun 2015, masih terdapat beberapa Desa yang belum bisa dijangkau komunikasi seluler atau masih terdapat area *blank spot*.

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Merupakan kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk memotret hal tersebut, dapat dilihat dari peningkatan pembangunan pendidikan, kesehatan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta tertanganinya masalah kesejahteraan sosial.

Dalam konteks tersebut di atas, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kotawaringin Timur setiap tahun mengalami peningkatan, namun yang masih rendah adalah rata - rata lama sekolah. Masalah lainnya adalah sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), belum semua tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kualifikasi semua standar dan belum meratanya penyebaran guru sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Masalah lain yang tak kalah penting adalah masih ada Kecamatan yang belum memiliki pendidikan menengah setingkat SMA / SMK atau yang sederajat, demikian juga desa - desa yang jauh dari Ibu Kota Kecamatan.



Di sisi lain, rendahnya kualitas kesehatan lingkungan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular, narkoba, kondisi Puskesmas di Kecamatan yang belum terakreditasi, belum semua desa dapat terlayani oleh tenaga kesehatan, kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang masih belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional menjadi masalah yang harus ditangani lintas sektor.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.

Berbagai permasalahan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya adalah masalah penataan aset dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan kinerja melalui aplikasi *e - government* (*e-planning*, *e-budgetting* dan *e-performance*) yang masih belum bisa dilaksanakan. Di sisi lain, masalah pelayanan publik dirasakan belum optimal, hal ini diindikasikan banyaknya keluhan masyarakat. Potensi sumber pendapatan, juga belum tergali optimal dan yang tak kalah pentingnya dan menjadi perhatian adalah belum optimalnya kualitas, kompetensi dan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara).

Ketahanan Pangan.

Permasalahan utama atau isu strategis yang terkait dengan masalah ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah rendahnya tingkat produktifitas tanaman pangan, kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian dan kurangnya lahan fungsional. Hal ini berdampak pada tingginya konsumsi beras per kapita, menurunnya tingkat konsumsi pangan non beras, rendahnya konsumsi protein hewani, sayur - sayuran dan buah - buahan.

Penguatan Pemerintahan Desa.

Berbagai permasalahan yang terkait dengan penguatan pemerintahan desa adalah belum selesainya tapat batas antar Desa dan antar Kecamatan, belum efektif dan berkembangnya lembaga perekonomian di masyarakat dan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa, di samping juga masih banyak Desa yang sarana dan prasarannya belum memadai.

Pemberdayaan Ekonomi.

Permasalahan atau isu strategis terkait dengan pemberdayaan ekonomi adalah lemahnya kerjasama dan kemitraan antara pengusaha / perusahaan yang telah maju dengan pengusaha / perusahaan yang masih lemah dan belum berkembang (kemitraan usaha ekonomi rakyat). Di samping itu perlu peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, memberikan suntikan modal / stimulan, memperkuat posisi transaksi, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, pemerataan spasial, peningkatan akses pengembangan SDM dan peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pelestarian Lingkungan Hidup.

Berbagai permasalahan atau isu strategis terkait pelestarian lingkungan hidup adalah banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan, rendahnya kewaspadaan dalam menghadapi ancaman bencana, intrusi air laut akibat kemarau panjang, belum optimalnya pengelolaan dan



pengendalian serta pengawasan lingkungan hidup, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup, belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah termasuk terhadap kebersihan lingkungan.

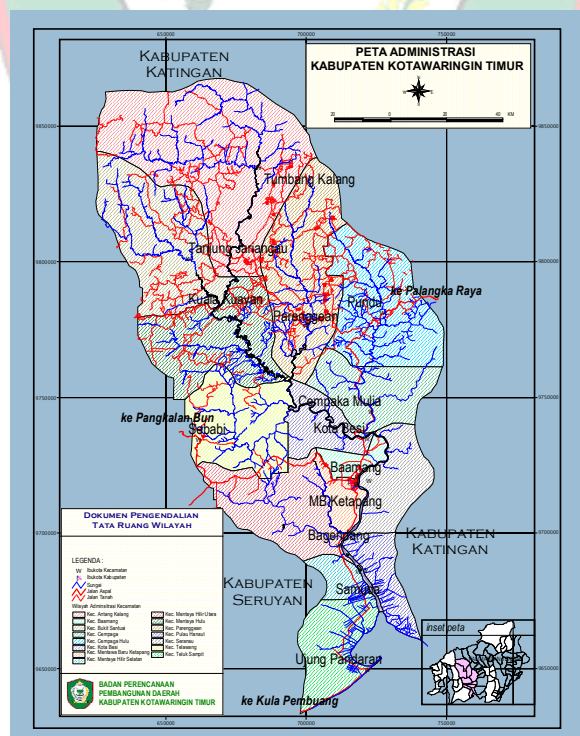
Penanggulangan Bencana.

Permasalahan utama atau isu strategis terkait penanggulangan bencana adalah ancaman terjadinya bencana asap (akibat kebakaran hutan dan lahan), banjir, gelombang pasang abrasi, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim dan bencana sosial. Hal tersebut merupakan bencana yang kerap terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dalam konteks tersebut, pencegahan merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan.

Pariwisata dan Pelestarian Budaya.

Berbagai permasalahan utama atau isu strategis terkait pariwisata dan pelestarian budaya adalah belum tertatanya kawasan wisata yang sesuai tata ruang, kurangnya sarana dan prasarana daya tarik wisata, kurangnya jumlah SDM pariwisata yang terampil, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sapta pesona, terbatasnya kemampuan melaksanakan promosi wisata, seni dan budaya, termasuk kurangnya kelembagaan organisasi pariwisata, seni dan budaya dan juga tidak tersedianya data akurat tentang kunjungan wisatawan domestik dan manca negara. Selain itu, masih terdapat destinasi wisata yang belum dikelola dan dipasarkan secara optimal.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Kotawaringin Timur





Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang yang menyangkut penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi (*strategic issue*), maksud dan tujuan disusunnya LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab Perencanaan Kinerja ini diuraikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran), Indikator Kinerja Utama, dan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab Akuntabilitas Kinerja diuraikan capaian kinerja organisasi (indikator kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja) dan akuntabilitas keuangan serta realisasi anggaran. Secara rinci, diuraikan analisa keberhasilan dan kegagalan setiap capaian sasaran kinerja, kendala yang dihadapi dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi (penyajian secara singkat pencapaian sasaran keuangan dan capaian indikator kinerja sasaran, rata - rata capaian target sasaran strategis, akuntabilitas keuangan, program - program pendukung capaian sasaran) dan strategi / langkah - langkah perbaikan kinerja (*action plan*) di masa akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau bisa disebut Rencana Strategis Daerah (RENSTRA), merupakan perencanaan jangka menengah yang bersifat global dan perlu dijabarkan lagi ke dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional serta berjangka pendek satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur. RPJMD disusun secara sistematis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan tidak mengabaikan RPJM Nasional.

Dalam konteks tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan RPJMD periode tahun 2016 - 2021 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021 . RPJMD Tahun 2016 - 2021 ini merupakan perjalanan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 - 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 mempunyai visi “ **Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah - Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional** ”. Disingkat menjadi **Motto Damai dan Mantap**. Implementasi dari visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang demokratis dalam bidang politik, sosial budaya, supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia;



2. Terwujudnya rasa aman bagi masyarakat;
3. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang maju, adil, dan makmur melalui pembangunan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia yang berkualitas, dan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh. Tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan yang diinginkan;
4. Sumberdaya alam yang terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan meningkatkan daya saing;
5. Jaringan transportasi yang mampu menjangkau ke perdesaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 12 (Dua belas) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari adalah mewujudkan keasrian kabupaten Kotawaringin Timur yang hijau dengan alam lingkungan yang lestari. Kelestarian lingkungan hidup ini untuk memberikan ruang yang layak bagi generasi mendatang. Lestari juga berarti mempertahankan tradisi dan situs-situs sejarah yang bermanfaat bagi pendidikan dan pariwisata. Tradisi dan situs sejarah dilestarikan agar masyarakat Kotawaringin Timur memiliki identitas budaya dan tidak melupakan masa lalunya;
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia. Artinya untuk mencapai Kotawaringin Timur yang maju diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdedikasi kepada daerahnya. Sumber daya manusia merupakan modal penting dalam memajukan suatu daerah;
3. Mengembangkan Industri Pengolahan adalah mewujudkan agro industri di Kabupaten Kotawaringin Timur baik industri hilir maupun industri hulu. Dengan pengembangan industri ini maka perekonomian Kotawaringin Timur tidak akan bergantung lagi pada sektor primer tetapi tercipta diversifikasi kegiatan ekonomi yang lain. Dengan pengembangan sektor industri diharapkan akan terjadi Peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan kesempatan kerja, dan nilai tambah produk pertanian;
4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur. Ini berarti bahwa pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas di Kabupaten Kotawaringin Timur disesuaikan dengan kondisi lahan dan iklim setempat. Dengan pendekatan agro ekosistem yang sesuai, produk pertanian akan memiliki daya saing yang tinggi;
5. Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman adalah sebuah kondisi yang mewujudkan rasa aman di masyarakat. Saling Tenggang rasa akan adanya perbedaan baik perbedaan agama ataupun suku. Rasa aman ini akan terwujud jika warga Kabupaten Kotawaringin Timur bersatu dan menjalankan kehidupannya secara demokratis;



6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial. Artinya untuk mewujudkan Kotawaringin Timur yang maju diperlukan peningkatan pelayanan fasilitas sosial terutama pendidikan dan kesehatan. Sehingga warga dapat mencapai fasilitas ini dengan biaya murah dan bermutu tinggi. Dengan demikian pelayanan fasilitas sosial ini dapat melayani seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pelosok ;
7. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertakwa. Berarti bahwa dalam setiap tindakan didasari oleh prinsip-prinsip keagamaan yang berfungsi untuk menjaga akhlak dan moralitas baik pegawai maupun penduduk Kotawaringin Timur pada umumnya ;
8. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi adalah pemerataan pembangunan jalan yang tidak hanya terkonsentrasi pada ibukota kabupaten tetapi juga sampai ke desa-desa sehingga ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kota besar. Selain itu juga mengembangkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah yang ideal untuk meningkatkan investasi dengan sarana dan prasarana yang memadai ;
9. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah meningkatkan pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan peningkatan pelayanan ini akan meningkatkan pula produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan ;
10. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana. Mitigasi bencana perlu dilakukan agar jumlah korban dan kerugian dapat diminimalkan. Bencana alam yang potensial terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah banjir dan kebakaran, baik kebakaran di permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan ;
11. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Menanamkan etos kerja, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta penempatan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian dapat melayani masyarakat secara profesional ;
12. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan, meningkatkan koordinasi pembangunan dengan kabupaten lain dan Provinsi Kalimantan Tengah, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi

Di sisi lain, RPJMD merupakan pedoman atau arah bagi Kepala Daerah / Bupati dan perangkatnya untuk menentukan pembangunan dalam jangka lima tahun, menjamin integrasi, sinkronisasi antar pelaku pembangunan, efektifitas dan efisiensi penggunaan segala sumberdaya, menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah. Selain itu RPJMD sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah (PD). Lebih jauh, RPJMD akan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan yang mengakomodir tujuan dan sasaran yang akan dicapai per tahun dan strategi / kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut, serta tolok ukur dan target kinerja yang dipakai untuk menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran dimaksud. Dengan kata lain, konsistensi



antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun benar - benar sinergis dan dapat diukur hasilnya.

1. Visi dan Misi

Sebagai pedoman dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur kurun waktu 2016 - 2021, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021. Dalam konteks tersebut, diperlukan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas dan terukur.

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, DINAMIS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DALAM SUASANA RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA

Disingkat menjadi Motto : *Manis Manasai*.

Penjabaran Visi tersebut :

- Madani** : dimaksudkan masyarakat yang maju, tercermin dari masyarakat yang beradab dan mengacu pada nilai - nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip - prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- Dinamis** : dimaksudkan masyarakat yang mampu untuk mengimbangi dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman secara cepat dan bijaksana dengan cara bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.
- Mandiri** : dimaksudkan Pemerintah dan masyarakat Kotawaringin Timur yang diarahkan untuk mengedepankan profesionalisme, sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pegawai dan aparatur Pemerintah Daerah adalah efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi azas keahlian, keterampilan dan *good governance*.
- Mandiri dan Berdaya Saing** : dimaksudkan sebagai masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkembang dengan baik di masa depan, dengan kekuatan yang dimiliki dan tidak sepenuhnya tergantung dengan daerah lain dan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai



sektor, adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi iklim investasi berskala kecil, menengah dan besar, sehingga mampu bersaing.

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) **Misi** sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak ;
- 2) Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan ;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien ;
- 4) Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, telah ditetapkan **tujuan dan sasaran strategis pembangunan** yang akan dicapai sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016 - 2021

No.	Tujuan	Sasaran
01.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya status kesehatan masyarakat
02.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
03.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja
04.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
05.	Peningkatan konektivitas jalan darat	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan
06.	Peningkatan kesejahteraan dan stabilitas daya beli masyarakat	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan
07.	Peningkatan kesejahteraan dan stabilitas daya beli masyarakat	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas
08.	Peningkatan kesejahteraan dan stabilitas daya beli masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan petani



No.	Tujuan	Sasaran
09.	Peningkatan kesejahteraan dan stabilitas daya beli masyarakat	Menguatnya perekonomian rakyat
10.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan
11.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas ruang publik
12.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman
13.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan
14.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
15.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kemandirian desa
16.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
17.	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
18.	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya investasi di daerah
19.	Peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicator* adalah alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan atau sasaran strategis suatu organisasi / Pemerintah Daerah. Setiap daerah / Kabupaten / Kota berkewajiban menyusun IKU sesuai dengan hirarki Perangkat Daerah. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007, IKU merupakan potret tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengisyaratkan tingkat keberhasilan dan kegagalan realisasi kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

IKU ditetapkan dengan memilih dan memilah serta dirumuskan dari indikator - indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021. IKU yang dikehendaki minimal **Hasil** atau **Outcome**. IKU yang tertuang dalam RPJMD harus didukung oleh IKU Perangkat Daerah, sekurang - kurangnya **Keluaran** atau **Output**. Dokumen IKU merupakan pedoman atau referensi bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), evaluasi pencapaian kinerja dan bahan penyusunan laporan kinerja (LKIP).



Indikator kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur dan Perangkat Daerah di bawahnya harus selaras / searah. Indikasinya terlihat dari kesamaan indikator kinerja sasaran Kabupaten Kotawaringin Timur dengan indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah di bawahnya atau dengan kata lain sesama indikator Perangkat Daerah saling berkontribusi terhadap indikator kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara kongkrit IKU Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,02
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,72
		2 Harapan lama sekolah	Tahun	12,62
3	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	Persentase angkatan kerja terampil/terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	%	34,58
4	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,93
		2 Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	0,009
5	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	1. Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,00
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	47,00
		3. Konektivitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	94,00
		4. Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	127
6	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	1. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	97,65
		2. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	93,00
7	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	1. Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	64,00
		2. Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	95,00
8	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	79,72
9	Menguatnya perekonomian rakyat	1. Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	18
		2. Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	17



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
10	Menurunnya pencemaran lingkungan	1.	Indeks tingkat pencemaran air	%	4,80
		2.	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	56,00
		3.	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	%	66,70
11	Meningkatnya kualitas ruang publik	1.	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	80,62
		2.	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	Ha	43,42
12	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	1.	Persentase penurunan jumlah titik api	%	100
		2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100
		3.	Persentase jumlah desa siaga bencana	%	100
13	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan		Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	%	13,13
14	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	1.	Capaian implemmentasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	Memuaskan
		2.	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB
		3.	Opini BPK	Opini	WTP
		4.	Nilai LPPD	Nilai	Baik
15	Meningkatnya kemandirian desa		Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Jumlah Desa	Sangat tertinggal : 47 Tertinggal : 60 Berkembang : 45 Maju : 13 Mandiri : 3
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik
17	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6,98
		2.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	9,40
		3.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,61
18	Meningkatnya investasi di daerah		Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	24,97
19	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa		Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	%	1,39



C. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Dalam dokumen tersebut tercantum **sasaran strategis, indikator kinerja utama** dan **target** yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemegang amanah. Dengan kata lain, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) adalah wujud dari janji / tekad untuk mewujudkan rencana kinerja tahunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Kotawaringin Timur. Refleksi pencapaian rencana kinerja tersebut tergambar dari capaian kinerja yang akan direalisasi oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun.

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021 yang sudah direvisi. Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	70,02
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,72
		2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,62
3	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja		Persentase angkatan kerja terampil/terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	%	34,58
4	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,93
		2	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	0,009
5	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,00
		2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	47,00
		3.	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	94,00
		4.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	127
6	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	1.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	97,65
		2.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	93,00



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
7	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	1.	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	64,00
		2.	Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	95,00
8	Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	79,72
9	Memperkuatnya perekonomian rakyat	1.	Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	18
		2.	Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	17
10	Menurunnya pencemaran lingkungan	1.	Indeks tingkat pencemaran air	%	4,80
		2.	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	56,00
		3.	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	%	66,70
11	Meningkatnya kualitas ruang publik	1.	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	80,62
		2.	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	Ha	43,42
12	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	1.	Persentase penurunan jumlah titik api	%	100
		2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100
		3.	Persentase jumlah desa siaga bencana	%	100
13	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan		Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	%	13,13
14	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	1.	Capaian implemmentasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	Memuaskan
		2.	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB
		3.	Opini BPK	Opini	WTP
		4.	Nilai LPPD	Nilai	Baik
15	Meningkatnya kemandirian desa		Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Jumlah Desa	Sangat tertinggal : 47 Tertinggal : 60 Berkembang : 45 Maju : 13 Mandiri : 3



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik
17	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6,98
		2.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	9,40
		3.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,61
18	Meningkatnya investasi di daerah	Persentase pertumbuhan nilai investasi		%	24,97
19	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB		%	1,39

Sebagai gambaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, dalam konteks mencapai sasaran dan target kinerja yang ingin diwujudkan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui APBD Tahun Anggaran 2020, telah mengalokasikan total belanja langsung sebesar **Rp 980.645.820.693,00** dengan rincian dalam tabel :

TABEL 2.3
RENCANA BELANJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	984.356.298.833,00	50,09
2.	Belanja Langsung (BL)	980.645.820.693,00	49,91
	Jumlah	1.965.002.119.526,00	100,00

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim.

Sedangkan anggaran belanja langsung tahun anggaran 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan yang prioritas, yang difokuskan untuk pencapaian sasaran strategis, sebagai berikut :



TABEL 2.4
ALOKASI BELANJA PER SASARAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN (Rp)	%
01.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	26.960.625.598,00	2,05
02.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	31.760.884.417,00	2,42
03.	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	172.876.500,00	0,01
04.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	411.202.000,00	0,03
05.	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	1.156.605.092.746,00	87,95
06.	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	411.346.000,00	0,03
07.	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	5.397.014.858,00	0,41
08.	Meningkatnya kesejahteraan petani	623.200.000,00	0,05
09.	Menguatnya perekonomian rakyat	331.526.503,00	0,03
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.955.717.000,00	0,22
11.	Meningkatnya kualitas ruang publik	2.716.018.141,00	0,21
12.	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	2.220.819.056,00	0,17
13.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	3.100.441.000,00	0,24
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	4.144.360.150,00	0,32
15.	Meningkatnya status perkembangan desa	535.798.300,00	0,04
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	50.077.758.449,00	3,81
17.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1.464.420.000,00	0,11
18.	Meningkatnya investasi di daerah	357.770.000,00	0,03
19.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa	24.884.982.700,00	1,89
	Jumlah	1.315.131.853.418,00	100

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. Indikator dan Pengukuran Kinerja

P erorangan, badan hukum atau pimpinan organisasi atau pimpinan kolektif, berkewajiban menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada berbagai pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, selaku pemegang amanah, berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam laporan kinerja tersebut tergambar tingkat pencapaian target masing - masing indikator sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021, RKPD Tahun 2020 dan PK Tahun 2020.

Dalam konteks tersebut di atas, pengukuran capaian sasaran strategis kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dengan realisasinya. Sesudah dilakukan penghitungan, akan diketahui selisih atau celah (*performance gap*). Atas dasar celah tersebut, akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang jitu meningkatkan kinerja di masa selanjutnya atau di masa yang akan datang (*performance improvement*). Indikator atau predikat pengukuran dimaksud dikategorikan sebagai berikut :



Urutan	Rentang Capaian / Persentase	Kategori Capaian / Predikat
I	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
II	Lebih dari 91 % hingga 100 %	Berhasil
II	Lebih dari 81 % hingga 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

Sebagai gambaran secara umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,02	69,85	99,76
Capaian Rata-Rata Sasaran							99,76
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.	Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,72	8,72	100,00
		2.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,62	100,00
Capaian Rata-Rata Sasaran							100,00
3.	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	1.	Persentase angkatan kerja terampil/terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	%	34,58	39,00	112,78
Capaian Rata-Rata Sasaran							112,78
4.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,93	87,91	99,98
		2.	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	0,009	0,006	66,67
Capaian Rata-Rata Sasaran							83,32
5.	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,00	50,93	101,86
		2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	47,00	46,82	99,62
		3.	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	94,00	92,86	98,79
		4.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	127	130	102,36
Capaian Rata-Rata Sasaran							100,66



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
6.	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	1.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	97,65	96,10	98,41
		2.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	93,00	85,70	92,15
Capaian Rata-Rata Sasaran							95,28
7.	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	1.	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	64,00	45,72	71,44
		2.	Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	95,00	85,39	89,88
Capaian Rata-Rata Sasaran							80,66
8.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	79,72	N/A**	--
Capaian Rata-Rata Sasaran							--
9.	Menguatnya perekonomian rakyat	1.	Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	9	6,61	73,44
		2.	Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	3	0,23	7,67
Capaian Rata-Rata Sasaran							40,56
10.	Menurunnya pencemaran lingkungan	1.	Indeks tingkat pencemaran air	Indeks	4,80	3,33	69,38
		2.	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	56,00	54,00	96,43
		3.	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	Indeks	66,70	41,80	62,67
Capaian Rata-Rata Sasaran							76,16
11.	Meningkatnya kualitas ruang publik	1.	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	80,62	11,86	14,71
		2.	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	Ha	43,42	-	-
Capaian Rata-Rata Sasaran							14,71
12.	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	1.	Persentase penurunan jumlah titik api	%	100,00	100	100,00
		2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	95	95,00



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
		3.	Persentase jumlah desa siaga bencana	%	100,00	-	-
Capaian Rata-Rata Sasaran							97,50
13.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	1.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	%	13,13	16,52	125,82
Capaian Rata-Rata Sasaran							125,82
14.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1.	Capaian Impelementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	Memuaskan	Memuaskan	100,00
		2.	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB	-	-
		3.	Opini BPK	Opini	WTP	-	-
		4.	Nilai LPPD	Nilai	Baik	-	-
Capaian Rata-Rata Sasaran							100,00
15.	Meningkatnya status perkembangan desa	1.	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Jumlah Desa	Sangat tertinggal : 47 Tertinggal : 60 Berkembang : 45 Maju : 13 Mandiri : 3	Sangat tertinggal : 27 Tertinggal : 65 Berkembang : 59 Maju : 15 Mandiri : 2	95,79
Capaian Rata-Rata Sasaran							95,79
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	100,00
Capaian Rata-Rata Sasaran							100,00
17.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6,98	3,86	55,30
		2.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	9,40	5,11	54,36
		3.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,61	9,39	109,06
Capaian Rata-Rata Sasaran							72,91
18.	Meningkatnya investasi di daerah	1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	24,97	132,46	530,48
Capaian Rata-Rata Sasaran							530,48



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
19.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa	1. Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	%	1,39	N/A**	--
Capaian Rata-Rata Sasaran						--
Capaian Rata-Rata Sasaran Kinerja						111,68

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tergambar tingkat capaian kinerja masing - masing Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

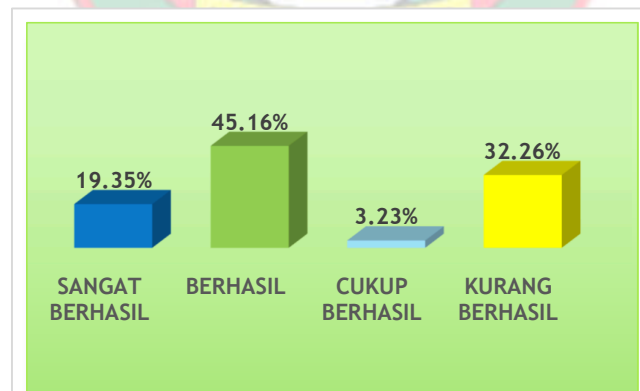
- Usia Harapan Hidup **99,76 %**
- Rata - rata lama sekolah **100,00 %**
- Harapan lama sekolah **100,00 %**
- Persentase angkatan kerja terampil / terdidik terhadap jumlah angkatan kerja **112,78 %**
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) **99,98 %**
- Prevalensi kekerasan terhadap anak - anak **66,67 %**
- Persentase jalan dalam kondisi baik **101,86 %**
- Persentase jembatan dalam kondisi baik **99,62 %**
- Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan **98,79 %**
- Jumlah kecelakaan lalu lintas **102,36 %**
- Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan **98,41. %**
- Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi **92,15 %**
- Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar **71,44 %**
- Persentase masyarakat yang terlayani air bersih **89,88 %**
- Nilai Tukar Petani (NTP) -- % (belum diterbitkan nilainya oleh BPS Kab. Kotawaringin Timur)
- Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru **73,44 %**
- Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya **7,67 %**
- Indeks tingkat pencemaran air **69,38%**
- Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) **96,43%**
- Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU) **62,67%**
- Persentase RTH kota dengan kondisi baik **14,71 %**
- Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati -
- Persentase penurunan jumlah titik api **100,00%**



24. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) **95,00 %**
25. Persentase jumlah desa siaga bencana **14,16 %**
26. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah **125,82 %**
27. Capaian implemmentasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) **100,00 %**
28. Nilai akuntabilitas kinerja – (belum diterbitkan Kemenpan dan RB)
29. Opini BPK – (belum diterbitkan BPK)
30. Nilai LPPD – (belum diterbitkan Kemendagri)
31. Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun) **95,79 %**
32. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) **100,00 %**
33. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan **55,30 %**
34. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan **54,36 %**
35. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor **109,06 %**
36. Persentase pertumbuhan nilai investasi **530,48**
37. Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB -- % (belum diterbitkan nilainya oleh BPS Kab. Kotawaringin Timur).

Secara grafik, dapat digambarkan capaian kinerja masing - masing IKU sebagai berikut :

Grafik 3.1
CAPAIAN IKU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020



Dari grafik tersebut di atas, dapat dilihat capaian masing - masing IKU yang masuk katagori **sangat berhasil** (**19,53 %**) ada **6 (enam)** indikator. Yang masuk predikat **berhasil** (**45,16%**) ada **14 (empat belas)** indikator. Yang masuk predikat **cukup berhasil** (**3,23 %**) ada **1 (satu)** indikator dan yang masuk predikat **kurang berhasil** (**32,26 %**) ada **10 (sepuluh)** indikator.



B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sebagai gambaran penilaian tingkat pencapaian masing - masing indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 - 2021 dan dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, telah ditetapkan 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian pencapaian kinerja dimaksud perlu diukur, sebagaimana tergambar yang pada tabel berikut :

Tabel 3.2
PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,02	69,85	99,76
Capaian Rata-Rata Sasaran							99,76
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.	Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,72	8,72	100,00
		2.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,62	100,00
Capaian Rata-Rata Sasaran							100,00
3.	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	1.	Persentase angkatan kerja terampil/terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	%	34,58	39,00	112,78
Capaian Rata-Rata Sasaran							112,78
4.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,93	87,91	99,98
		2.	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	0,009	0,006	66,67
Capaian Rata-Rata Sasaran							83,32
5.	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,00	50,93	101,86
		2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	47,00	46,82	99,62
		3.	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	94,00	92,86	98,79
		4.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	127	130	102,36
Capaian Rata-Rata Sasaran							100,66



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
6.	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	1.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	97,65	96,10	98,41
		2.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	93,00	85,70	92,15
Capaian Rata-Rata Sasaran							95,28
7.	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	1.	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	64,00	45,72	71,44
		2.	Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	95,00	85,39	89,88
Capaian Rata-Rata Sasaran							80,66
8.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	79,72	N/A**	--
Capaian Rata-Rata Sasaran							--
9.	Menguatnya perekonomian rakyat	1.	Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	9	6,61	73,44
		2.	Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	3	0,23	7,67
Capaian Rata-Rata Sasaran							40,56
10.	Menurunnya pencemaran lingkungan	1.	Indeks tingkat pencemaran air	Indeks	4,80	3,33	69,38
		2.	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	56,00	54,00	96,43
		3.	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	Indeks	66,70	41,80	62,67
Capaian Rata-Rata Sasaran							76,16
11.	Meningkatnya kualitas ruang publik	1.	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	80,62	11,86	14,71
		2.	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	Ha	43,42	-	-
Capaian Rata-Rata Sasaran							14,71
12.	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	1.	Persentase penurunan jumlah titik api	%	100,00	100	100,00
		2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	95	95,00



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
		3.	Persentase jumlah desa siaga bencana	%	100,00	-	-
Capaian Rata-Rata Sasaran							97,50
13.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	1.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	%	13,13	16,52	125,82
Capaian Rata-Rata Sasaran							125,82
14.	Meningkatnya penyelenggaraa n urusan pemerintah daerah	1.	Capaian impelementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	Memuaskan	Memuaskan	100,00
		2.	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB	-	-
		3.	Opini BPK	Opini	WTP	-	-
		4.	Nilai LPPD	Nilai	Baik	-	-
Capaian Rata-Rata Sasaran							100,00
15.	Meningkatnya status perkembangan desa	1.	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Jumlah Desa	Sangat tertinggal : 47 Tertinggal : 60 Berkembang : 45 Maju : 13 Mandiri : 3	Sangat tertinggal : 27 Tertinggal : 65 Berkembang : 59 Maju : 15 Mandiri : 2	95,79
Capaian Rata-Rata Sasaran							95,79
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	100,00
Capaian Rata-Rata Sasaran							100,00
17.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6,98	3,86	55,30
		2.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	9,40	5,11	54,36
		3.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,61	9,39	109,06
Capaian Rata-Rata Sasaran							72,91
18.	Meningkatnya investasi di daerah	1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	24,97	132,46	530,48
Capaian Rata-Rata Sasaran							530,48



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
19.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa	1. Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	%	1,39	N/A**	--
Capaian Rata-Rata Sasaran						--
Capaian Rata-Rata Sasaran Kinerja						111,68

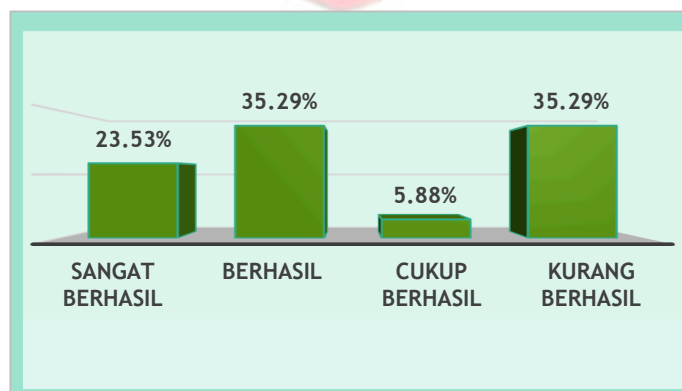
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut di atas, dapat digambarkan pencapaian rata - rata sasaran tahun 2020 secara spesifik, menurut katagori sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
PREDIKAT RATA - RATA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020

NO.	PREDIKAT	RATA - RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR	SASARAN
1.	Sangat Berhasil	Lebih dari 100 %	6	4
2.	Berhasil	Lebih dari 91 % hingga 100 %	14	6
3.	Cukup Berhasil	Lebih dari 81 % hingga 90 %	1	1
4.	Kurang Berhasil	Kurang dari 81 %	10	6

Secara grafik, rata - rata capaian sasaran kinerja tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut :

Grafik 3.2
RATA - RATA PENCAPAIAN SASARAN KINERJA STRATEGIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020





Tabel 3.4
CAPAIAN KEBERHASILAN SASARAN KINERJA STRATEGIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	KURANG BERHASIL
1.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		√		
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		√		
3.	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	√			
4.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			√	
5.	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	√			
6.	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan		√		
7.	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas				√
8.	Meningkatnya kesejahteraan petani	--	--	--	--
9.	Menguatnya perekonomian rakyat				√
10.	Menurunnya pencemaran lingkungan				√
11.	Meningkatnya kualitas ruang publik				√
12.	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman				√
13.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	√			
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi		√		
15.	Meningkatnya status perkembangan desa		√		
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		√		



NO	SASARAN STRATEGIS	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	KURANG BERHASIL
17	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan				√
18	Meningkatnya investasi di daerah	√			
19	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa	--	--	--	--

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas, dapat dilihat capaian sasaran kinerja strategis yang masuk predikat **sangat berhasil** ada 4 (empat) sasaran (23,53 %) dengan 6 (enam) indikator. Capaian sasaran kinerja strategis yang masuk predikat **berhasil** ada 6 (enam) sasaran (35,29 %) dengan 14 (empat belas) indikator. Capaian sasaran kinerja strategis yang masuk predikat **cukup berhasil** ada 1 (satu) sasaran (5,88 %) dengan 1 (satu) indikator dan capaian sasaran kinerja strategis yang masuk predikat **kurang berhasil** ada 6 (enam) sasaran (29,41 %) dengan 10 (Sepuluh) indikator. Secara komprehensif, ternyata belum semua sasaran kinerja strategis dimaksud tercapai dengan sempurna (berhasil dan sangat berhasil). Dapat disimpulkan, keseluruhan rata - rata capaian sasaran kinerja strategis tahun 2020 adalah 111,68 % atau mendapat predikat **sangat berhasil** atau **melebihi target**.

Untuk menggali dan mendalami sebab - sebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran kinerja dan indikatornya, perlu dilakukan evaluasi lebih cermat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan status kesehatan masyarakat

Untuk melihat capaian sasaran di atas, diukur dengan 1 indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,02	69,85	99,76
Capaian rata-rata					99,76%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa rata - rata capaian sasaran kinerja 1 “ **Meningkatnya status kesehatan masyarakat** ” sebesar 99,76 % atau masuk predikat **Berhasil**. Sedangkan capaian indikator kinerja “ **Usia Harapan Hidup** ” sebesar 99,76 % atau masuk dalam berpredikat **Berhasil**.



Sasaran kinerja Strategis 1 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.**" Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan biaya sebesar **Rp. 21.667.236.784,00** melalui program - program sebagai berikut :

1. Program Kalimantan Tengah Berkah (**Rp 21.600.056.870,00**) ;
2. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak (**Rp 67.179.914,00**) ;

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini sebagai berikut :

1. Adanya anggaran, baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi, APBN dan bantuan luar negeri serta non Pemerintah (*Consumer Social Responsibility / CSR*) dan LSM ;
2. Komitmen Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ;
3. Dukungan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan ;
4. Kerjasama lembaga pendidikan Bidang Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan ;
5. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam pengembangan UKBM dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Berbagai faktor kegagalan atau faktor yang menghambat pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Adanya Pandemi Covid -19, berdampak hampir pada semua kegiatan yang bersifat pengumpulan masyarakat dibatasi. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan ;
2. *Refocusing* / pengalihan anggaran akibat Pandemi Covid - 19, berdampak tidak dapat direalisasikan sarana dan prasarana beberapa kegiatan ;
3. Kesulitan geografis dan transportasi serta keberadaan pelayanan kesehatan itu sendiri ;
4. Kompetensi tenaga medis dan paramedis yang mampu memberikan pertolongan yang baik dan benar, terutama di daerah perdesaan masih kurang ;
5. Koordinasi dan konsolidasi permasalahan kesehatan yang masih belum responsif ;
6. Persepsi sebagian masyarakat, khususnya di daerah sangat terpencil, mereka pada umumnya lebih senang ditolong dukun ;
7. Keterlambatan dan ketidak akuratan data dan informasi ;
8. Target sasaran berdasarkan jumlah penduduk atas dasar data Pusdatin, cenderung lebih besar dari data Kabupaten ;
9. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang baik, terbatas jumlahnya ;
10. Beban kerja tenaga kesehatan selaku penyedia layanan dan sekaligus sebagai tenaga administrasi, berdampak pada menurunnya kinerja ;
11. Persepsi dan pengetahuan petugas tentang teknis administrasi dan indikator - indikator kinerja belum lagi optimal.



Solusi atas masalah pencapaian indikator kinerja dimaksud sebagai berikut :

1. Pandemi Covid - 19 harus segera diatasi, agar situasi dan kondisi daerah menjadi normal kembali dan perekonomian bisa tumbuh secara progresif ;
2. Perlu normalisasi anggaran kesehatan yang signifikan, agar capaian sasaran dan indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan ;
3. Perlu penetapan data sasaran penduduk dengan berbasis pada data kependudukan yang melalui perhitungan riil dengan NIK (data Disdukcapil)
4. Perlu penambahan tenaga medis dan paramedis yang cukup untuk melayani kesehatan masyarakat, terutama untuk daerah perdesaan ;
5. Perlu peningkatan kompetensi dengan memperhatikan mapping SDK dan permasalahan kesehatan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur ;
6. Perlu merekrut tenaga administrasi khusus, agar lebih mengoptimalkan tenaga kesehatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada .

Tabel 3.6
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			EVALUASI RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	...	69,85	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi capaian indikator kinerja tahun 2020 terhadap hasil evaluasi RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi Usia Harapan Hidup sebesar **69,85 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD tahun 2019 yang kosong (tahun 2019 tidak dilakukan evaluasi RPJMD tahun 2016 - 2021 oleh Kemendagri), maka capaiannya dianggap telah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.7
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN
TAHUN 2020 - 2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	--	100,00	--	100,00	69,83	100,03	--	100,00	69,85



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Realisasi Usia Harapan Hidup adalah **69,85** tahun pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN 2019 (**69,83 tahun**) dengan capaian **100,03 %**, maka tidak ada kenaikan atau penurunan. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2020 yang kosong, maka dianggap telah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**. Target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2020 yang tidak ada nilainya ini, terjadi karena tidak ditemukan indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya.

Sedangkan perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur sejak tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Usia Harapan Hidup	Realisasi	%	--	--	69,75	69,83	69,85
		Capaian	%	--	--	100,59	99,89	99,76

Analisis perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Realisasi Usia Harapan Hidup tahun 2020 sebesar **69,85 %** dengan capaian kinerja **99,76 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 (**69,83 %**) dengan capaian **99,89 %**, maka ada penurunan sedikit. Demikian juga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 (**69,75 %**) dengan capaian **100,59 %**, maka ada penurunan sedikit. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, hal tidak bisa dilakukan karena pada tahun tersebut ada perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.9

PENGUKURAN CAPAIAN STRATEGIS 2

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,72	8,72	100,00
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,62	100,00
Capaian rata - rata					100,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa rata - rata capaian sasaran 2 “ **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat** ” sebesar **100,00 %** masuk predikat **berhasi** atau mencapai target. Sedangkan capaian indikator kinerja “ **Rata - rata lama sekolah** ” sebesar **100,00 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**. Capaian indikator kinerja “ **Harapan lama sekolah** ” sebesar **100,00 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**.

Sasaran kinerja Strategis 2 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi “ **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak** ”. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan biaya sebesar **Rp. 32.301.732.026,00** melalui program - program sebagai berikut :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (**Rp 31.578.694.860,00**) ;
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini (**Rp. 723.037.166,00**) ;

Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Adanya bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu (Kartu Indonesia Pintar), bantuan dana BOS, bantuan seragam, bantuan sepatu, bantuan buku dan bantuan transportasi, berpengaruh signifikan terhadap rata - rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Demikian juga dengan meningkatnya kesadaran dan perhatian orang tua dalam memotivasi anaknya untuk tetap bersekolah, termasuk dukungan lingkungan keluarga dan sekolah. Upaya kerja keras yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas penunjang lainnya untuk memberantas buta huruf melalui perluasan pendidikan formal dan non formal, Wajib Belajar Sembilan Tahun, Kejar Paket A dan Paket B. Hampir pada semua kesempatan acara dan kunjungan kerja baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Bupati / Kepala Daerah / unsur Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat / anak usia sekolah, serta mengadakan sekolah gratis secara selektif, agar masyarakat terpanggil untuk belajar dan pada akhirnya bisa membaca, menulis dengan baik dan tidak putus sekolah di tengah jalan.
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik (SD / MI / SMP / MTSN) melalui berbagai pendidikan formal (peningkatan derajat kesarjanaan S1 - S3) dan pendidikan non formal (Diklat Teknis, Diklat Fungsional / Work Shop / Musyawarah / Seminar / Loka Karya dll)



3. Pendekatan persuasif oleh tenaga pengajar / guru kepada orang tua murid / siswa agar mereka sadar arti sekolah bagi anak - anaknya dengan tujuan anak didik bisa bersekolah terus.

Berbagai faktor yang menghambat pencapaian indikator kinerja antara lain :

4. Adanya anak yang diminta orang tuanya untuk mencari nafkah, minder, takut, tidak punya buku, tidak punya seragam dan salah pergaulan (terlibat narkoba dan pergaulan bebas). Rendahnya minat masyarakat untuk belajar, terutama bagi anak wanita, masih ada anggapan belajar / sekolah bagi anak wanita bukan hal yang penting, karena mereka akan ikut suaminya dan mereka bukan tulang punggung keluarga.
5. Adanya orang tua bekerja di tempat yang jauh dan anak dititipkan di tempat keluarga lain, sehingga kurang perhatian, anak sering bolos sekolah dan pada akhirnya berhenti sekolah. Lemahnya ekonomi keluarga (keluarga miskin / pra sejahtera), mendorong orangtua memperkerjakan anaknya untuk mencari nafkah dan mengesampingkan pendidikannya.
6. Kurangnya perhatian / bimbingan orang tua terhadap anak untuk tetap sekolah dan lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal murid / siswa ke sekolah, mendorong orangtua malas menyekolahkan anaknya. Disisi lain, resiko kejahatan / kecelakaan yang akan terjadi di jalan dan marak terjadi, menjadi faktor penghambat bagi orangtua karena takut kejahatan / kecelakaan menimpa anaknya.

Solusi atas masalah dalam pencapaian indikator kinerja antara lain :

1. Perlu penambahan dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), perlu program sosialisasi bagi orang tua agar wajib / tetap menyekolahkan anaknya. Harus dipikirkan dengan cermat, agar pembangunan sekolah di daerah pedalaman (Desa / Kecamatan terjauh / terpencil) mendekati tempat tinggal murid / orangtua atau disediakan angkutan umum yang memadai (mobil / truk / kapal kecil / kelotok / speedboath).
2. Perlu Peraturan Daerah yang mengatur dan mewajibkan orang tua menyekolahkan anaknya. Menciptakan lapangan kerja tambahan (ternak ayam / ikan keramba / kebun karet / kebun sawit) bagi orangtua murid yang tergolong pra sejahtera / miskin / kurang mampu).

Tabel 3.10
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Rata - rata lama sekolah	Tahun	---	8,72	100,00
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	---	12,62	100,00



Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi rata - rata lama sekolah sebesar **8,72 tahun** pada tahun 2020.. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD tahun 2019 yang kosong (tahun 2019 tidak dilakukan evaluasi RPJMD tahun 2016 - 2021 oleh Kemendagri), maka capaiannya dianggap telah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.
2. Realisasi harapan lama sekolah sebesar **12,62 tahun** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD tahun 2019 yang kosong (tahun 2019 tidak dilakukan evaluasi RPJMD tahun 2016 - 2021 oleh Kemendagri), maka capaiannya dianggap telah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.11
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2017 - 2020

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI							
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1.	Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,80	89,87	--	100,00	8,80	89,89	8,52	102,35
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	--	100,00	--	100,00	--	100,00	12,92	97,68

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi rata - rata lama sekolah adalah **8,72 tahun** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 adalah **8,52 tahun** atau mencapai **102,35 %**. Capaian ini masuk katagori **sangat berhasil**. Dengan kata lain, rata - rata lama sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur usia 15 tahun ke atas tahun 2020, lebih baik dari standar nasional. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 (**8,80 tahun**) dengan capaian **89,89 %**, maka realisasi tahun 2020 (**8,72 tahun**) dengan capaian **102,35 % lebih baik kondisinya**. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017 (**8,80 tahun**) dengan capaian **89,87 %**, maka ada penurunan sedikit. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2018 yang kosong, maka dianggap telah mencapai **100 %** atau masuk predikat **berhasil**. Target RPJMN tahun 2018 yang tidak ada nilainya ini, terjadi karena tidak ditemukan indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya.
2. Realisasi Harapan lama sekolah adalah **12,62 tahun** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 (**12,92 tahun**) dengan capaian **97,68 %**, maka capaian ini masuk katagori **berhasil**. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2019 yang kosong, maka dianggap telah mencapai **100 %** atau masuk



predikat **berhasil**. Target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2019 yang tidak ada nilainya ini, terjadi karena tidak ditemukan indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya.

Sedangkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Rata - rata lama sekolah	Realisasi	Tahun	--	--	7,90	7,91	8,72
		Capaian	%	--	--	100,13	100,00	100,00
2.	Harapan lama sekolah	Realisasi	Tahun	--	--	12,60	12,62	12,62
		Capaian	%	--	--	100,08	100,00	100,00

Analisis perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Realisasi rata - rata lama sekolah tahun 2020 sebesar **8,72 tahun** dengan capaian sebesar **100,00 %**. Kalau dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**100,13 %**) dan tahun 2019 (**100,00 %**), maka ada penurunan sedikit. Realisasi capaian Rata - rata lama sekolah tahun 2020 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
2. Realisasi Harapan lama sekolah tahun 2020 sebesar **12,62 tahun** dengan capaian **100,00 %**. Kalau dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**100,08 %**) dan tahun 2019 (**100,00 %**), maka tidak ada penurunan atau kenaikan yang berarti. Realisasi capaian Harapan lama sekolah tahun 2020 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja

Untuk melihat capaian sasaran tersebut di atas, diukur dengan 1 indikator kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.13
PENGUKURAN CAPAIAN STRATEGIS 3

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase angkatan kerja terampil / terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	%	34,58	39,00	112,78
Capaian rata - rata					112,78 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa rata - rata capaian sasaran 3 “ **Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja** ” sebesar **112,78 %** atau masuk predikat **sangat berhasil** atau melampaui target. Sedangkan capaian indikator kinerja “ **Persentase angkatan kerja terampil / terdidik terhadap jumlah angkatan kerja** ” adalah sebesar **112,78 %** atau masuk predikat **sangat berhasil** atau melampaui target.

Sasaran Strategis 3 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi “ **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak**”. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 47.506.250,00** melalui Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (**Rp. 47.506.250,00**);

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Adanya anggaran yang tersedia dalam jumlah yang memadai.
2. Proses perencanaan yang matang.
3. Tersedianya fasilitas pendukung yang memadai.

Berbagai faktor yang menghambat pencapaian indikator kinerja antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
2. Rendahnya kualitas tenaga kerja.
3. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja.
4. Terbatasnya anggaran yang diberikan untuk kegiatan pelatihan.

Solusi atas masalah dalam pencapaian indikator kinerja antara lain :

1. Penambahan kegiatan pelatihan keterampilan kepada masyarakat.
2. Diadakan pelatihan kerja yang terampil.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan masarakat.
4. Diadakan kegiatan pemagangan di perusahaan atau pemerintahan.



Tabel 3.14

**REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Persentase angkatan kerja terampil/terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	%	---	39,00	100,00

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat realisasi capaian indikator kinerja tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi Persentase angkatan kerja terampil / terdidik terhadap jumlah angkatan kerja adalah **39,00 tahun** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD tahun 2019 yang kosong (tahun 2019 tidak dilakukan evaluasi RPJMD tahun 2016 - 2021 oleh Kemendagri), maka capaiannya dianggap telah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.15
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020 - 2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Persentase angkatan kerja terampil / terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	Tahun	--	100,00	--	100,00	51,00	40,00	---	100,00	39,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi Persentase angkatan kerja terampil / terdidik terhadap jumlah angkatan kerja adalah **39,00 %** tahun pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 (**51,00 %**) dengan capaian **40,00 %**, maka nyata ada penurunan. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2020 yang kosong, maka dianggap telah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**. Target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2020 yang tidak ada nilainya ini, terjadi karena tidak ditemukan indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya.



Sedangkan perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.16
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase angkatan kerja terampil / terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	Realisasi	%	--	--	99,15	40,00	39,00
		Capaian	%	--	--	294,21	117,10	112,78

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Persentase angkatan kerja terampil / terdidik terhadap jumlah angkatan kerja tahun 2020 sebesar **39,00 %** dengan capaian sebesar **112,78 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**117,10 %**), maka ada penurunan sedikit dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**294,21 %**), maka ada penurunan yang signifikan. Capaian ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 4 : **Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.17
PENGUKURAN CAPAIAN STRATEGIS 4

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,93	87,91	99,98
2.	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	0,009	0,006	66,67
Capaian Rata-Rata					83,32

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa rata - rata capaian sasaran 4 “ **Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** ” sebesar **83,32 %** atau masuk predikat **cukup berhasil** atau **mendekati target**. Sedangkan capaian indikator kinerja “ **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** ” sebesar **99,98 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**. Capaian indikator kinerja



“ Prevalensi kekerasan terhadap anak - anak “ sebesar 66,67 % atau masuk predikat kurang berhasil atau tidak mencapai target.

Sasaran Strategis 4 merupakan upaya untuk mewujudkan Misi “**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.**” Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 129.965.000,00** melalui program - program sebagai berikut :

- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Rp 101.675.000,00);
- Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (Rp. 28.290.000,00);

Berbagai faktor keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A.
- Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak.

Berbagai faktor kegagalan atau yang menghambat pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terbatasnya anggaran karena rasionalisasi dampak covid-19.
- Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal
- Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- Terbatasnya personil yang melayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG.
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level.
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG).
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Masih tingginya angka kemiskinan, merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG.



- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level.
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG).
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Solusi atas masalah pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini antara lain :

1. Normalisasi atau peningkatan anggaran..
2. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor
3. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten / Kota upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak.
4. Penguatan kelembagaan dan pengembangan, partisipasi masyarakat.
5. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang.

Tabel 3.18
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	---	87,91	100,00
2.	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	---	0,006	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar **87,91** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi RPJMD akhir tahun 2019 yang kosong, maka capaiannya dianggap **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.
2. Realisasi Prevalensi kekerasan terhadap anak - anak sebesar **0,006 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi RPJMD akhir tahun 2019 yang masih kosong, maka capaiannya dianggap **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :



Tabel 3.19
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020 - 2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								Realisasi Tahun 2020
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	--	100,00	--	100,00	90,99	96,61	90,99	96,61	87,91
2.	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	--	100,00	--	100,00	9,40	0,06	9,40	0,06	0,006

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah **87,91** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 (**90,99 %**), maka capaiannya **96,61 %** atau masuk predikat **berhasil**. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2019 (**69,60**) dengan capaian **87,74 %**, maka ada kenaikan sedikit. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017 dan 2018 yang kosong, maka dianggap telah mencapai **100 %** atau masuk predikat **berhasil**.
2. Realisasi Prevalensi kekerasan terhadap anak - anak adalah **0,006 %** tahun pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 (**9,40 %**) dengan capaian **0,06 %** dan tahun 2019 (**9,40 %**) dengan capaian **0,06 %**, maka **kurang berhasil**. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017 dan 2018 yang kosong, maka dianggap telah mencapai **100 %** atau masuk predikat **berhasil**. Target RPJMN tahun 2017 dan 2018 yang tidak ada nilainya ini, terjadi karena tidak ditemukan indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Sedangkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 - 2020, dapat digambarkan atau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Realisasi	Indeks	--	--	87,73	87,74	87,91
		Capaian	%	--	--	100,52	100,14	99,98
2.	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	Realisasi	%	--	--	0,012	0,003	0,006
		Capaian	%	--	--	120,00	30,00	66,67

Perbandingan capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2020 sebesar **87,91** dengan capaian sebesar **99,98 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**100,52 %**) dan tahun 2019 (**100,14 %**), maka ada penurunan sedikit. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan



sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

2. Realisasi prevalensi kekerasan terhadap anak - anak tahun 2020 sebesar **0,006 %** dengan capaian sebesar **66,67 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**120,00 %**) dan tahun 2019 (**30,00 %**), maka ada penurunan sedikit dan ada kenaikan sedikit. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 5 : Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 4 indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.21
PENGUKURAN CAPAIAN STRATEGIS 5

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,00	50,93	101,86
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	47,00	46,82	99,62
3.	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	94,00	92,86	98,79
4.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	127	130	102,36
Capaian Rata-rata					100,66 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata - rata capaian sasaran 5 “ **Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan.**” sebesar **100,66 %** atau masuk dalam predikat **sangat berhasil** atau **melebihi target**. Sedangkan capaian indikator kinerja “ **Persentase jalan dalam kondisi baik** “ sebesar **101,86 %** atau masuk dalam predikat **sangat berhasil** atau **melebihi target**. Capaian indikator kinerja “ **Persentase jembatan dalam kondisi baik** “ sebesar **99,62 %** atau masuk dalam predikat **berhasil**. Capaian indikator kinerja “ **Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibu Kota Kecamatan** “ sebesar **98,79 %** atau masuk dalam predikat **berhasil**. Capaian indikator kinerja “**Jumlah kecelakaan lalu lintas**” sebesar **102,36 %** atau masuk dalam predikat **sangat berhasil**.

Sasaran Strategis 5 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi “**Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan**” Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 81.073.232.186,00** melalui program - program sebagai berikut :

1. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan (**Rp 980.328.735,00**);
2. Program pembangunan jalan dan jembatan (**Rp. 79.951.520.901,00**);
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (**Rp. 141.382.550,00**);

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja " **Persentase jalan dalam kondisi baik, Persentase jembatan dalam kondisi baik Persentase jembatan dalam kondisi baik dan Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan** " sebagai berikut :

1. Adanya paket Pekerjaan Multy Years mulai tahun 2018 dan berakhir tahun 2020.
2. Adanya dukungan manajemen yang baik.
3. Proses perencanaan yang matang.
4. Proses lelang yang sesuai dengan jadwal.
5. Adanya dukungan masyarakat di sekitar kegiatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi kegagalan capaian indikator kinerja **Persentase jalan dalam kondisi baik, Persentase jembatan dalam kondisi baik Persentase jembatan dalam kondisi baik dan Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan** " antara lain :

1. Tidak terlaksananya program / kegiatan sesuai rencana.
2. Refocusing anggaran akibat dampak pandemi covid-19 .
3. Kesiapan lahan untuk pembangunan jalan (ganti rugi lahan dan status kawasan) memerlukan waktu yang cukup lama.
4. Khusus menyangkut air bersih, karena terbatasnya anggaran, kegiatan dilaksanakan secara bertahap, sehingga jaringan air bersih belum bisa berfungsi maksimal.
5. Masih banyak konstruksi jembatan dari kayu ulin dalam kondisi rusak berat, sedangkan kayu ulin saat ini semakin sulit didapatkan di pasaran. Di samping itu, kayu ulin termasuk jenis kayu yang dilindungi.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut di atas yaitu :

1. Penganggaran kembali di tahun anggaran selanjutnya dan perkuatan pemeliharaan jembatan.
2. Perlu pembiayaan yang cukup untuk merivitalisasi jembatan kayu ulin menjadi jembatan beton.
3. Pembebasan status kawasan dan pinjam pakai kawasan pada rencana pembangunan jalan desa ke Ibu Kota Kecamatan (12 Desa masih belum terkoneksi).

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja " **Jumlah kecelakaan lalu lintas** " sebagai berikut :



1. Tersediannya sarana angkutan kapal fery penyebrangan Sampit - Seranau (PP), sebanyak 2 kapal fery KM Fitria dan KM Akbar.
2. Tersediannya sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai di jalan - jalan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat pengguna jalan akan tertib lalu lintas.
4. Dinas perhubungan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan keselamatan jalan kepada pengguna jalan baik pengemudi sepeda motor dan pengemudi kendaraan roda 4 (mobil) dan angkutan barang dengan pelaksanaan sosialisasi *safety riding*.
5. Tersedianya pelayanan penyetoran retribusi di lingkungan Kantor Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Bank Kalteng Cabang Sampit.

Beberapa faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi kegagalan capaian indikator kinerja " **Jumlah kecelakaan lalu lintas** " antara lain :

1. Masih banyaknya pengguna jalan yang belum taat terhadap kepatuhan berlalulintas.
2. Banyaknya kerusakan jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan.
3. Untuk pemasangan fasilitas jalan berupa rambu lalulintas dll. Masih terkendala oleh kewenangan jalan, dimana jalan Kabupaten dilaksanakan oleh Polisi, sementara jalan nasional dilaksanakan oleh kemitraan kemitraan penuh.
4. Berkurangnya PAD di Bidang perpajakan, berupa retribusi perpajakan akibat wabah pandemi Covid-19.
5. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas di Bidang Transportasi.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja " **Jumlah kecelakaan lalu lintas** " yaitu :

1. Masih minimnya sarana dan prasarana jalan.
2. Masih banyak ditemui kerusakan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Minimnya anggaran pengadanan sarana dan prasarana jalan.
4. Kurangnya kualitas SDM ASN, hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pekerjaan.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut di atas yaitu :

1. Penganggaran kembali / peningkatan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya.
2. Mengusulkan perubahan kewenangan pemasangan rambu lalulintas / fasilitas jalan kepada pihak - pihak terkait.



Foto Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Jalan

Tabel 3.22
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	---	50,93	100,00
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	---	46,82	100,00
3.	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	---	92,86	100,00
4.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	---	130	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi persentase jalan dalam kondisi baik sebesar **50,93 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka dianggap capaiannya telah mencapai **100,00 %** atau **berhasil**.
2. Realisasi Persentase jembatan dalam kondisi baik menjadi **46,82 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka dianggap capaiannya telah mencapai **100,00 %** atau **berhasil**.
3. Realisasi Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan sebesar **92,86 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka dianggap capaiannya telah mencapai **100,00 %** atau **berhasil**.
4. Realisasi Jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak **130 kali** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka dianggap capaiannya telah mencapai **100,00 %** atau **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020, perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya.



Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.23
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020 - 2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	99,00	51,36	--	100,00	92,00	55,36	92,00	55,36	50,93
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	46,82
3.	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	--	100,00	--	100,00	98,00	92,86	--	100,00	92,86
4.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	130

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi Persentase jalan dalam kondisi baik adalah **50,93 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 (**92,00 %**) dengan capaian **55,36 %** , maka jelas terjadi penurunan. Capaian ini tentu saja lebih rendah dari target nasional yang ditetapkan atau dengan kata lain capaian Kabupaten Kotawaringin Timur belum mencapai target atau dibawah target nasional. Jika dibandingkan dan dengan target RPJMN tahun 2017 (**99,00 %**) dengan capaian **51,36 %** dan tahun 2019 (**92,00 %**) dengan capaian **55,36 %** , maka jelas terjadi penurunan. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2018 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2018 yang tidak ada nilainya ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
2. Realisasi Persentase jembatan dalam kondisi baik adalah **46,82 %** tahun pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
3. Realisasi konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan adalah **92,86 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
4. Realisasi jumlah kecelakaan lalu lintas adalah **130** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya, maka



dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.24
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	Realisasi	%	--	--	50,16	50,85	50,93
		Capaian	%	--	--	104,50	100,67	101,86
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Realisasi	%	--	--	46,07	46,82	46,82
		Capaian	%	--	--	102,38	96,52	99,62
3.	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	Realisasi	%	--	--	91,07	92,86	92,86
		Capaian	%	--	--	98,99	102,31	98,79
4.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Realisasi	Jumlah	--	--	180,00	137,00	130,00
		Capaian	%	--	--	127,00	102,24	102,36

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar **50,93 %** dengan capaian sebesar **101,86 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**100,67 %**) dan tahun 2018 (**104,50 %**), maka ada kenaikan dan penurunan sedikit. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
2. Realisasi persentase jembatan dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar **46,82 %** dengan capaian sebesar **99,62 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**96,52 %**) dan tahun 2018 (**102,38 %**), maka ada kenaikan dan penurunan sedikit. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
3. Realisasi konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan tahun 2020 sebesar **92,86 %** dengan capaian sebesar **98,79 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**102,31 %**) dan tahun 2018 (**98,99 %**), maka ada penurunan sedikit. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan



sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

4. Realisasi Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2020 sebesar **130,00 kali** dengan capaian sebesar **102,36 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**102,24 %**) dan tahun 2018 (**127,00 %**), maka ada penurunan sedikit. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 6 : Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.25
PENGUKURAN CAPAIAN STRATEGIS 6

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	97,65	96,10	98,41
2.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	93,00	85,70	92,15
Capaian Rata-rata					95,28%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, menunjukkan rata - rata capaian sasaran 6 " **Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan**" sebesar **95,28 %** atau masuk predikat **berhasil**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan** " sebesar **98,41 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**. Capaian indikator kinerja " **Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** " sebesar **92,15 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**.

Sasaran Strategis 6 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan**". Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 95.035.000,00** melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan) (**Rp. 95.035.000,00**);

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja antara lain :

1. Adanya Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Perpres Nomor 83 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.



3. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Perbup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
5. SDM yang tersedia cukup berkualitas dan cukup kuantitasnya.
6. Data yang tersedia baik internal dan eksternal selalu valid dan tepat waktu.

Beberapa kendala yang berpotensi penyebab kegagalan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja antara lain :

1. Belum tersedianya regulasi daerah tentang cadangan beras pemerintah.
2. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (BBSA).
3. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha pangan dalam hal bahan pangan tambahan (BTP) yang aman untuk dikonsumsi
4. Tidak semua desa mampu mandiri pangan dalam hal ketersediaan pangan.
5. Terbatasnya modal dalam pengolahan komoditi pangan.
6. Masih tingginya inflasi di kota Sampit.
7. Belum tersedianya cadangan beras pemerintah (Permentan No. 11 2018)
8. Energi dan protein masih belum berimbang ditandai masih rendah nya skor piada beberapa kelompok pangan yaitu Sayur dan Buah, Buah / Biji Berminyak, Gula dan Umbi-umbian.
9. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*).
10. Pola pangan harapan penduduk masih terdapat ketimpangan :
 - Masih tingginya konsumsi padi - padian terutama beras
 - Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah
11. Pemanfaatan sumber - sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah

Berbagai solusi atas masalah dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dimaksud antara lain :

1. Menyusun Perda cadangan beras pemerintah daerah yang mengatur oprasional kegiatan dimulai dari proses perencanaan penganggaran, penyimpanan hingga distribusinya.
2. Mengoptimalkan sosialisasi tentang pemahaman tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (BBSA).
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan Bahan Tambahan Pangan (BTP).
4. Mengoptimalkan cadangan pangan yang ada di masarakat melalui pengaktifan Lumbungan Pangan Masyarakat (LPM).
5. Mengaktifkan Lembaga Keuangan Desa (LKD).
6. Memberdayakan petugas enumerator pangan baik di tingkat produsen, distributor, maupun pasar agar informasi harga dicatat dan diproses tiap hari.



7. Memberdayakan kelompok wanita (KWT) melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Salah satunya mengembangkan komoditi yang terkait langsung dengan inflasi, antara lain ayam potong, bawang merah dan cabe.
8. Memberdayakan petugas enumerator pangan, baik di tingkat produsen, distributor, maupun pasar, agar informasi harga dicatat dan diproses tiap hari.

Tabel 3.26
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	---	96,10	100,00
2.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	---	85,70	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar **96,10 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka dianggap capaiannya telah mencapai **100,00 %** atau **berhasil**.
2. Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar **85,70 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka dianggap capaiannya telah mencapai **100,00 %** atau **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.27
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020 - 2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	--	100,00	--	100,00	--	95,00	86,4	111,23	96,10
2.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	--	100,00	--	100,00	--	83,70	86,4	99,19	85,70



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar **96,10 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 (**86,4 %**), maka jelas PPH Ketersediaan Kabupaten Kotawaringin Timur melampaui target nasional. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2019 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2019 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
2. Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah **85,70 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 (**86,4 %**), maka jelas PPH Ketersediaan Kabupaten Kotawaringin Timur di bawah target nasional. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2019 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018 dan 2019 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.28
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Realisasi	%	--	--	91,30	95,00	96,10
		Capaian	%	--	--	100,88	83,70	98,41
2.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Realisasi	%	--	--	90,20	83,70	85,70
		Capaian	%	--	--	101,58	91,38	92,15

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tahun 2020 sebesar **96,10 %** dengan capaian **98,41 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**100,88 %**) dan capaian tahun 2019 (**83,70 %**), maka ada penurunan dan kenaikan sedikit. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
2. Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2020 sebesar **85,70 %** dengan capaian **92,15 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**101,58 %**) dan tahun 2019 (**91,38 %**), maka ada penurunan dan kenaikan sedikit. Capaian tahun 2020 ini



belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 7 : Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, dapat diukur dengan 2 indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.29
PENGUKURAN CAPAIAN STRATEGIS 7

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	64,00	45,72	71,44
2	Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	95,00	85,39	89,88
Capaian Rata-rata					80,66

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa rata - rata capaian sasaran 7 “ **Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas** “ ini adalah **80,66 %** atau masuk predikat **kurang berhasil**. Sedangkan capaian indikator kinerja “ **Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar** “ sebesar **71,44 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil**. Capaian indikator kinerja “ **Persentase masyarakat yang terlayani air bersih** “ sebesar **89.88 %** atau masuk dalam predikat **cukup berhasil**.

Sasaran Strategis 7 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi “ **Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastuktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan** “. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. -** melalui program - program sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sanitasi (**Rp. -**) ;
2. Program pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan (**Rp. -**).

Beberapa faktor kegagalan yang mempengaruhi tercapainya sasaran dan indikator kinerja antara lain :

1. Pendanaannya dialihkan untuk penanganan wabah Covid -19.
2. Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan, baik untuk Tangki Septick Individual maupun Tangki Septick Komunal



3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sarana Sanitasi yang baik dan sehat
4. Lokasi kegiatan pembangunan yang mendukung kegiatan stunting dan sanitasi jauh dari perkotaan dan memerlukan sarana serta biaya yang cukup besar untuk mencapainya
5. Kurangnya kegiatan Bimtek untuk menunjang kegiatan pembangunan sanitasi

Solusi atas berbagai masalah dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja antara lain :

1. Anggaran untuk kegiatan ini direncanakan kembali pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung Kegiatan Sanitasi
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sarana sanitasi yang baik
4. Meningkatkan kemampuan tenaga teknis di bidang Sanitasi dengan mengikuti Bimtek Sanitasi



Foto Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Insfrastuktur Sosial

Tabel 3.30

**REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	---	45,72	100,00
2.	Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	---	85,39	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :



1. Realisasi persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar sebesar **45,72 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka dianggap capaiannya telah mencapai **100,00 %** atau **berhasil**.
2. Realisasi persentase masyarakat yang terlayani air bersih menjadi **89,39 %** pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka dianggap capaiannya telah mencapai **100,00 %** atau **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.31
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020 - 2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								Realisasi Tahun 2020
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	
1.	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	100,00	51,44	--	--	100,00	51,44	--	--	45,72
2.	Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	100,00	85,39	--	--	100,00	85,39	87,80	97,25	85,39

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar adalah **45,72 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 yang kosong, maka hal ini tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017 (**100,00%**) dengan capaian **51,44 %** dan target RPJMN tahun 2019 (**100,00%**) dengan capaian **51,44 %**, maka nyata tidak ada kenaikan atau penurunan. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2018 yang kosong atau tidak ada nilainya, maka dianggap capainya telah mencapai **100,00 %**.
2. Realisasi persentase masyarakat yang terlayani air bersih adalah **85,39 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 (**87,80 %**) dengan capaian (**97,25 %**), maka masuk perdiket **berhasil**. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017 (**100,00 %**) dengan capaian **85,39 %** dan tahun **2019 (100,00 %)** dengan capaian **85,39 %**, maka nyata ada penurunan sedikit. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2018 dengan target yang kosong atau tidak ada nilainya, maka dianggap capainya telah mencapai **100,00 %**.

Untuk melihat perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 3.32
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	Realisasi	%	--	--	51,16	51,44	45,72
		Capaian	%	--	--	82,52	81,65	71,44
2.	Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	Realisasi	%	--	--	80,11	85,39	85,39
		Capaian	%	--	--	96,52	95,94	89,88

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar tahun 2020 sebesar **45,72 %** dengan capaian **71,44 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**81,65 %**) dan tahun 2018 (**82,52 %**), maka ada penurunan sedikit. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
2. Realisasi persentase masyarakat yang terlayani air bersih tahun 2020 sebesar **85,39 %** dengan capaian **89,88 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**95,94 %**) dan tahun 2018 (**96,52 %**), maka ada penurunan sedikit. Capaian tahun 2019 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 8 : Meningkatkan kesejahteraan petani

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja. sebagai berikut :

Tabel 3.33
PENGUKURAN CAPAIAN STRATEGIS 8

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	79,72	N/A**	---
Capaian Rata-rata					---

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, memperlihatkan bahwa rata - rata capaian sasaran 8 " **Meningkatnya kesejahteraan petani**" belum ada realisasinya atau nilainya capaiannya masih **0 %**, sehingga belum bisa diukur. Hal ini terjadi karena realisasi indikatornya



kinerjanya belum bisa diterbitkan atau belum dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Diperkirakan angka realisasi tersebut baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021 berjalan. Perlu disampaikan, bahwa berdasarkan FGD tahun 2019 yang lalu, dihadiri Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pusat Statistik dinyatakan bahwa yang berwenang menghitung NTP adalah BPS Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sasaran Strategis 8 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan**". Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 974.940.000,00** melalui dukungan beberapa program atau kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (**Rp. 7.590.000,00**);
2. Program Pengembangan Usaha Tani (**Rp. 827.255.000,00**);
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (**Rp. 140.095.000,00**);

Berbagai faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini sebagai berikut :

1. Indikator kinerja merupakan keluaran dari program – program teknis yang saling mendukung satu dengan lainnya.
2. Pelaksanaan program – program pendukung sesuai dengan skedul, identifikasi lokasi, sosialisasi, penyebaran komoditi (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan).
3. Dukungan sarana dan prasarana (Alsintan, infrastruktur lahan), pelatihan petani, penghitungan angka produktifitas serta pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan (Juknis).

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini sebagai berikut :

1. Masih banyak lahan potensi dan lahan pertanian *existing* yang masuk dalam kawasan hutan produksi.
2. Pelayanan penyediaan sarana produksi di beberapa wilayah tertentu masih kurang lancar.
3. Tingkat kehilangan hasil panen dan pasca panen relatif masih tinggi.
4. Kecenderungan untuk mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan.
5. Manajemen usaha tani dan kualitas produk relatif rendah, sehingga kalah bersaing dengan produk yang masuk dari luar daerah.
6. Beralihnya fungsi lahan pertanian yang potensial untuk kemudian dijadikan areal tanaman kelapa sawit. Peralihan fungsi ini mengakibatkan kurangnya lahan fungsional untuk usaha pertanian tanaman pangan.



7. Belum disahkannya RTRWP sehingga terkendala untuk perluasan areal tanam khususnya di daerah yang termasuk kawasan hutan produksi.
8. Perilaku (pendidikan, sikap, kemampuan dan keterampilan) petani yang dirasakan sulit berinteraksi dengan teknologi yang dianjurkan dan informasi pasar.

Solusi atas berbagai masalah / kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja antara lain :

1. Mendorong dan mempercepat terbitnya Perda mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) , dimana telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan BPTP Provinsi Kalimantan Tengah, yang didanai dari APBD Kab. Kotawaringin Timur.
2. Mendorong adanya kepastian hukum bagi petani pemilik lahan untuk masuk dalam program pemanfaatan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian.
3. Sosialisasi penggunaan pupuk organik alternatif untuk mendorong petani di pedesaan memanfaatkan lahan organik yang tersedia dalam mengantisipasi kurang lancarnya pelayanan saprodi terutama pupuk.
4. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memotivasi petani dalam berusaha, termasuk penanganan panen dan pasca panen agar produksi lebih optimal hasilnya.
5. Mengintensifkan pelatihan, pembinaan dan bimbingan UPJA.
6. Menggali potensi investasi dan memfasilitasi kegiatan temu usaha dalam rangka menarik minat investor dan mengembangkan pola kemitraan dan perkreditan.
7. Optimasi pemanfaatan lahan melalui Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) dan Perluasan Areal Tanaman (PAT) akan terus dilakukan untuk meningkatkan luas areal tanam dan produktivitas tanaman pangan.
8. Mengupayakan peningkatan kinerja petugas lapangan melalui pengembangan pola penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan peningkatan kemampuan penyuluh.
9. Optimasi lembaga perbenihan yang ada UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Kebun Bibit Hortikultura (KBH) Pelantaran dan mendorong berkembangnya penangkaran benih di lokasi - lokasi potensial.
10. Mengintensifkan pembinaan terhadap kelompok tani penerima kredit atau penerima Bansos / BPLM lama / baru dalam rangka lancarnya perguliran dana bantuan tersebut.
11. Terus mengupayakan peningkatan populasi ternak melalui investasi swasta dan pengadaan ternak oleh pemerintah, dan mengintensifkan pembinaan terhadap ternak - ternak yang ada.



Tabel 3.34
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	--	N/A**	-

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

- Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2020 ini belum ada realisasinya atau nilainya capaiannya masih **0,00 %**, sehingga belum bisa diukur. Hal ini terjadi karena realisasi indikatornya kinerjanya belum bisa diterbitkan atau belum dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Diperkirakan angka realisasi tersebut baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021 berjalan. Perlu disampaikan, bahwa berdasarkan FGD tahun 2019 yang lalu, dihadiri Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pusat Statistik dinyatakan bahwa yang berwenang menghitung NTP adalah BPS Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.35
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN STANDAR / TARGET RPJMN TAHUN 2020 - 2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	--	--	--	--	--	N/A**	79,72	--	N/A**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

- Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2019 ini belum ada realisasinya atau nilainya capaiannya masih **0,00 %**, sehingga belum bisa diukur. Hal ini terjadi karena realisasi indikatornya kinerjanya belum bisa diterbitkan atau belum dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Diperkirakan angka realisasi tersebut baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021 berjalan. Perlu disampaikan, bahwa berdasarkan FGD tahun 2019 yang lalu, dihadiri Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pusat Statistik dinyatakan bahwa yang berwenang menghitung NTP adalah BPS Kabupaten Kotawaringin Timur.



Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.36
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Realisasi	Indeks	--	--	81,01	N/A**	N/A**
		Capaian	%	--	--	102,23	--	--

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2019 ini belum ada realisasinya atau nilainya capaiannya masih **0,00 %**, sehingga belum bisa diukur. Hal ini terjadi karena realisasi indikatornya kinerjanya belum bisa diterbitkan atau belum dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Diperkirakan angka realisasi tersebut baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021 berjalan. Perlu disampaikan, bahwa berdasarkan FGD tahun 2019 yang lalu, dihadiri Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pusat Statistik dinyatakan bahwa yang berwenang menghitung NTP adalah BPS Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sasaran 9 : Menguatnya perekonomian rakyat

Untuk melihat capaian sasaran kinerja tersebut di atas, diukur dengan 1 indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.37
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	9	6,61	73,44
2.	Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	3	0,23	7,67
Capaian Rata-rata					40,56

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, menunjukkan rata - rata capaian sasaran kinerja 9 " **Menguatnya perekonomian rakyat**" sebesar **39,06 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **belum mencapai target**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Persentase pertumbuhan usaha (UMKM - IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru** " sebesar **73,44 %** atau



masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **belum mencapai target**. Capaian indikator kinerja “ **Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya** ” sebesar 7,67 % atau masuk dalam katagori **kurang berhasil**.

Sasaran Strategis 9 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi “ **Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastuktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan**” Pencapaian sasaran ini dilaksanakan inas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 112.790.000,00** melalui Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (**Rp. 112.790.000,00**).

Beberapa faktor kegagalan pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pembinaan terhadap usaha masyarakat.
2. Kurangnya pendampingan oleh dinas / pihak terkait.
3. Faktor internal dan eksternal.
4. Kurangnya SDM yang berkualitas untuk menangani usaha masyarakat.
5. Anggaran yang diberikan tidak mencukupi.
6. Geografis / wilayah yang luas menyulitkan penanganan terhadap usaha masyarakat.

Solusi atas berbagai masalah / kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja antara lain :

1. Perlu diadakan atau memberikan Diklat teknis terhadap aparatur yang menangani permasalahan usaha masyarakat.
2. Perlu penambahan anggaran yang cukup agar penanganan masalah usaha masarakat bisa optimal.
3. Perlu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar penanganan masalaah usaha masarakat cepat tertangani.
4. Perlu diberikan Diklat kepada pelaku usaha agar mereka memiliki keterampilan yang memadai, baik tentang manajemen usaha maupun produk usaha.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, pengembangan kualitas produk, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, serta penguasaan dan pemanfaatan teknologi.
2. Pengembangan usaha koperasi yang belum maksimal.
3. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, menyebabkan pembinaan UMKM dan Koperasi kurang maksimal.
4. Kualitas SDM pembina dan pendamping masih kurang.



Beberapa solusi yang diharapkan dapat meningkatkan capaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan UMKM dilakukan melalui pembinaan produksi dan pengolahan, peningkatan pemasaran, peningkatan kualitas SDM dan pendataan produk unggulan inovatif.
2. Melakukan pembinaan ke koperasi dalam konteks pengembangan usaha.
3. Pelatihan dan pendidikan aparatur.
4. Penambahan anggaran yang diperlukan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana.

Tabel 3.38
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Persentase pertumbuhan usaha (UMKM - IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	--	6,61	100,00
2.	Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	--	0,23	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi persentase pertumbuhan kredit usaha masyarakat (IKM dan UMKM) sebesar **6,61 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang kosong atau belum ada nilainya, maka capaiannya dianggap telah mencapai **100 %** atau **berhasil**.
2. Realisasi persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya sebesar **0,23 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang kosong atau belum ada nilainya, maka capaiannya dianggap telah mencapai **100 %** atau **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2019 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :



Tabel 3.39
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020 - 2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								Realisasi Tahun 2020
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	
1.	Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	6,61
2.	Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	0,23

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi persentase pertumbuhan usaha (UMKM – IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru adalah **6,61 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
2. Realisasi persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya adalah **0,23 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan

Perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.40
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase pertumbuhan kredit usaha masyarakat (IKM dan UMKM)	Realisasi	%	--	--	10,65	16,00	6,61
		Capaian	%	--	--	66,56	94,12	73,44
2	Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	Realisasi	%	--	--	--	--	0,23
		Capaian	%	--	--	--	--	4,67

Sedangkan perbandingan peningkatan / penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Realisasi persentase pertumbuhan kredit usaha masyarakat (IKM dan UMKM) tahun 2020 sebesar **6,61 %** dengan capaian sebesar **73,44 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**66,56 %**) dan tahun 2019 (**94,12 %**), maka ada kenaikan dan penurunan yang lumayan. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
2. Realisasi persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya tahun 2020 sebesar **0,23 %** dengan capaian sebesar **7,67 %**. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019, karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 10 : Menurunnya pencemaran lingkungan

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 3 indikator kinerja. sebagai berikut :

Tabel 3.41
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 10

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks tingkat pencemaran air	Indeks	4,80	3,33	69,38
2.	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	56,00	54,00	96,43
3.	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	Indeks	66,70	41,80	62,67
Capaian Rata-rata					76,16

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, menunjukkan rata - rata capaian sasaran kinerja 10 " **Menurunnya pencemaran lingkungan** " sebesar **76,16 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **belum mencapai target**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Indeks tingkat pencemaran air** " **69,38 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil**. Capaian indikator kinerja " **Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)** " **96,43 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**. Capaian indikator kinerja " **Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)** " mencapai **62,67 %**.



Khusus pencapaian indikator kinerja **Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)**, indikator ini mempunyai makna atau arti semakin kecil angka realisasi (**41,80**), maka kualitas udara semakin **baik** atau **sehat**. Sebaliknya, semakin besar angka realisasi, maka kualitas udara semakin **buruk** atau **tidak sehat**. Perbedaan angka dan kategori kualitas udara, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.42
Tabel Angka dan Kategori Indeks Standar Pencemaran Udara
(I S P U)

No.	INDEKS	KATEGORI
1	1 – 50	Baik
2	51 – 100	Sedang
3	101 – 199	Tidak Sehat
4	200 – 299	Sangat Tidak Sehat
5	300 – lebih	Berbahaya

Sasaran Strategis 10 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi ” **Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan** ” Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 2.290.759.468,00** melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (**Rp. 56.977.000,00**);
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (**Rp. 2.179.371.973,00**);
3. Program peningkatan pengendalian polusi (**Rp. 54.410.495,00**);

Beberapa faktor kegagalan atau yang menghambat pencapaian sasaran dan indikator kinerja antara lain :

1. Jumlah parameter yang dipantau kurang maksimal.
2. Pengamatan terhadap titik pantau belum maksimal.
3. Sarana dan prasarana serta SDM yang kurang memadai.
4. Minimnya anggaran untuk melakukan *controlling*.
5. Peralatan alat pantau udara yang memerlukan daya listrik yang besar.
6. Kurangnya armada pengangkut sampah.
7. Kondisi sarana dan prasarana truk pengangkut sampah dan alat berat yang sering mengalami kerusakan.
8. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
9. Kurangnya tenaga kerja pengangkut sampah.
10. Banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang dibongkar karena permintaan warga dengan alasan kotor dan bau.



11. Masyarakat membuang sampah di luar TPS / Bak *Container* yang telah disediakan dan membuang sampah di luar jam buang sampah.
12. Pencurian lampu hias, ketersediaan anggaran yang tidak sesuai cakupan pemeliharaan, pengadaan PJU Solarcell dengan teknologi smart system terkendala pendanaan yang terbatas dan pengadaan Meterisasi PJU tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
13. Kurangnya kesaadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
14. Kepedulian masyarakat sangat minim terhadap keindahan kota, perencanaan yang tumpang tindih, koordinasi yang kurang optimal antar SOPD / Perangkat Daerah terkait.

Berbagai solusi atas masalah dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dimaksud antara lain :

1. Armada pengangkut sampah ditambah jumlahnya.
2. Perlunya penambahan jumlah titik pantau udara dan periode pemantauan, mengingat luas wilayah Kab. Kotawaringin Timur.
3. Melakukan perawatan rutin dan perbaikan jika ada alat berat yang rusak.
4. Perlunya perhitungan daya tampung sungai Mentaya dalam upaya mencegah peningkatan pencemaran.
5. Keikutsertaan pihak perkebunan, tambang dan lain - lain untuk bersama - sama memantau / *controlling* limbah untuk mencegah pencemaran.
6. Tenaga kerja pengangkut sampah ditambah jumlahnya .
7. Penambahan TPS dan penempatan kembali pada titik yang tidak mengganggu masyarakat, baik bau dan sampahnya.
8. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara kontinyu melalui tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta pemberian sanksi, agar memberikan efek jera.

Tabel 3.43
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Indeks tingkat pencemaran air	Indeks	--	3,33	100,00
2.	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	--	54,00	100,00
3.	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	Indeks	--	41,80	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :



1. Realisasi indeks tingkat pencemaran air tahun 2020 sebesar **3,33**. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong , maka capaiannya dianggap sudah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.
2. Realisasi persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tahun 2020 sebesar **54,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka capaiannya dianggap sudah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.
3. Realisasi Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU) 2020 sebesar **41,80**. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong, maka capaiannya dianggap sudah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.44
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI							
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1.	Indeks tingkat pencemaran air	Indeks	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00
2.	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00
3.	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	Indeks	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi indeks tingkat pencemaran air adalah **3,33 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
2. Realisasi persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah **54,00 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
3. Realisasi tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU) adalah **41,80** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018,



2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Sedangkan perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.45
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Indeks tingkat pencemaran air	Realisasi	Indeks	--	--	4,60	5,6	3,33
		Capaian	%	--	--	92,00	111,78	69,38
2.	Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Realisasi	%	--	--	5,68	66,48	54,00
		Capaian	%	--	--	101,17	116,63	96,43
3.	Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	Realisasi	Indeks	--	--	38	126	41,80
		Capaian	%	--	--	76,00	210,00	62,67

Perbandingan peningkatan / penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Indeks tingkat pencemaran air tahun 2020 sebesar **3,33 %** dengan capaian kinerja sebesar **69,38 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**111,78 %**) dan tahun 2018 (**92,00 %**), maka nyata penurunan yang lumayan besar. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
2. Realisasi Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tahun 2020 sebesar **54,00 %** dengan capaian kinerja sebesar **96,43 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**116,63 %**) dan tahun 2018 (**101,17 %**), maka nyata penurunan yang lumayan. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
3. Realisasi Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU) tahun 2019 sebesar **41,80** dengan capaian kinerja sebesar **62,67 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**210,00 %**) dan tahun 2018 (**76,00 %**), maka nyata penurunan



yang signifikan. Khusus pencapaian indikator kinerja **Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)**, indikator ini mempunyai makna atau arti semakin besar angka realisasi, maka kualitas udara semakin **buruk** atau **Tidak Sehat**. Sebaliknya, semakin kecil angka realisasi, maka kualitas udara semakin **baik** atau **semakin sehat**. Di sisi lain, capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 11 : Meningkatkan kualitas ruang publik

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja. sebagai berikut :

Tabel 3.46
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 11

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	80,62	11,86	14,71
2.	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	Ha	43,42	-	-
Capaian Rata-rata					14,71

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, menunjukkan rata - rata capaian sasaran 11 " **Meningkatnya kualitas ruang publik**" sebesar **14,71%** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **tidak mencapai target**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Persentase RTH kota dengan kondisi baik** " **14,71 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **tidak mencapai target**. Capaian indikator kinerja " **Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati** " belum bisa dibandingkan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi perubahan Tugas Pokok dan Fungsi. Pada tahun tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah tidak menangani lagi masalah kawasan kumuh ini.

Sasaran Strategis 11 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan**" Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas Lingkungan Hidup dengan biaya sebesar **Rp. 2.576.393.693,00** melalui beberapa program sebagai berikut :



1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (**Rp 2.561.208.193,00**);
2. Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (**Rp 15.185.500,00**).

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung.
2. Berkurangnya kawasan kumuh.
3. Tersedianya SDM yang cukup memadai kualitasnya.
4. Ada bantuan dana CSR dari pihak ketiga untuk RTH.
5. Adanya penganggaran terhadap penyusunan kebijakan daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Masyarakat kurang berpartisipasi menjaga RTH.
2. Pendampingan penyusunan Raperda Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh tidak dapat dilanjutkan.
3. Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman tidak dapat dilanjutkan.
4. Tidak tersedianya lahan oleh Pemerintah Daerah.
5. Belum dibuatnya dokumen penataan bantaran sungai.
6. Belum tersedia lahan untuk merelokasi masyarakat di permukiman kumuh.
7. Tanaman sering hilang dan rusak serta pot bunga yang juga dirusak.
8. Ada bantuan dana CSR dari pihak ketiga untuk RTH.
9. Belum selesainya Perda tentang Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
10. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah atau lahan dipermukiman kumuh.
11. Tidak ada lahan untuk merelokasi masyarakat di permukiman kumuh

Berbagai solusi atas masalah dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dimaksud antara lain :

1. Wajib Mereview RP3KP (Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PR2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan).
2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk menyusun Perda tentang Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
3. Tersedianya anggaran yang cukup untuk menyusun Perda tentang Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
4. Konsolidasi tanah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur.



Tabel 3.47
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	--	11,86	100,00
2.	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	ha	--	--	--

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi persentase RTH kota dengan kondisi baik tahun 2020 sebesar **11,86 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong , maka capaiannya dianggap sudah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.
2. Realisasi luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati tahun 2020 belum ada nilainya atau kosong. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong juga , maka belum bisa dibandingkan.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2019 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2025. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.48
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN STANDAR / TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	--	100,00	--	100,00	--	2,26	--	100,00	11,86
2.	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	ha	--	100,00	--	100,00	--	21,08	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi persentase RTH kota dengan kondisi baik adalah **11,86 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2020 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.



- Realisasi luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati adalah kosong atau belum ada nilainya, sehingga belum bisa diukur. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.49
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase RTH kota dengan kondisi baik	Realisasi	%	--	--	2,34	2,26	11,86
		Capaian	%	--	--	100,00	2,81	14,71
2.	Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	Realisasi	Ha	--	--	47,42	21,08	--
		Capaian	%	--	--	100,00	46,41	--

Perbandingan peningkatan/penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi persentase RTH kota dengan kondisi baik tahun 2020 sebesar **11,86 %** dengan capaian kinerja sebesar **14,71%**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (**2,81 %**) dan tahun 2018 (**100,00 %**), maka ada penurunan yang signifikan. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
- Realisasi Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati kosong atau belum ada nilainya tahun 2020. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun, 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 12 :

Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja. sebagai berikut :



Tabel 3.50
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 12

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penurunan jumlah titik api	%	100	100	100,00
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	95	95,00
3.	Persentase jumlah desa siaga bencana	%	100	14,16	14,16
Capaian Rata-rata					69,72 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, menunjukkan rata - rata capaian sasaran 12 " **Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman**" sebesar **69,72 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **tidak mencapai target**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Persentase penurunan jumlah titik api** " **100,00 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**. Capaian indikator kinerja " **Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** " **95,00 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**. Capaian indikator kinerja " **Persentase jumlah desa siaga bencana** " **14,16 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **belum mencapai target**.

Sasaran Strategis 12 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan**" Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 12.475.498.048,00** melalui beberapa program sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (**Rp. 10.527.640.217,00**);
2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Hutan (**Rp. 1.947.857.831,00**);

Beberapa faktor kegagalan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber air : Sumur Kebakaran, tendon air, hidran kota, dan sebagainya guna keperluan pemadaman
2. Luas wilayah yang dilayani oleh DPKP tidak sebanding dengan jumlah Pos Kebakaran yang ada
3. Perkembangan dan kemajuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Timur yang semakin pesat, resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat
4. Akses jalan sempit
5. Sulit karena jauh dari jalan
6. Rendahnya kesadaran masyarakat pada bahaya kebakaran
7. Informasi lokasi kejadian yang diterima tidak akurat



8. Luasnya areal lahan dan hutan yang terbakar, terkadang apai yang sudah padam terbakar kembali karena sifat dari gambut terbakar dibawah permukaan.
9. Kebiasaan masyarakat yang selalu tergantung dengan bantuan pemerintah ketika terjadi bencana.
10. Faktor alam yang menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Timur selalu berdampak kebakaran hutan dan lahan dimana disertai cuaca yang kekeringan.
11. Belum adanya sistem pendeteksian dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
12. Belum optimalnya sosialisasi yang dapat menjangkar secara luas kesadaran masyarakat berkenaan dampak kebakaran hutan dan lahan.

Beberapa kendala dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi geografis Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Kesadaran masyarakat pada saat mobil Damkar lewat tidak memberi jalan
3. Pada saat kejadian kebakaran masyarakat banyak yang menonton
4. Keterbatasan dana
5. Keterbatasan personil DPKP di Lapangan
6. Keterbatasan sarana dan prasarana
7. Keterlambatan laporan sehingga kebakaran meluas dan susah dikendalikan sehingga menimbulkan titik-titik hotspot baru.
8. Daerah terbakar tidak mudah dijangkau
9. Lokasi kebakaran sebagian di lahan gambut
10. Sulitnya mendapatkan sumber air di areal kebakaran
11. Terbatasnya sarana, prasarana, sumber daya manusia dan dana operasional terkait luas wilayah kebakaran hutan dan lahan
12. Proses pemadaman kebakaran lahan dalam 1 (satu) lokasi terkadang memakan waktu lama

Beberapa solusi atas masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tersedianya dana yang cukup
2. Penambahan personil Satgas Damkar
3. Pengadaan sarana dan prasarana Damkar
4. Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar saat mobil damkar lewat segera minggir/menepi
5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
6. Peningkatan bantuan logistik dan peralatan kepada desa rawan kebakaran hutan dan lahan
7. Peningkatan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) secara bertahap sehingga di masing-masing desa rawan bencana kebakaran sudah ada



Tabel 3.51
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Persentase penurunan jumlah titik api	%	--	100,00	100,00
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	--	95	100,00
3.	Persentase jumlah desa siaga bencana	%	--	14,16	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap hasil evaluasi RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi persentase penurunan jumlah titik api tahun 2020 sebesar **100,00 %** dengan capaian **100,00 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong , maka capaiannya dianggap sudah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.
2. Realisasi tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tahun 2020 sebesar **95,00 %** dengan capaian **95,00 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong , maka capaiannya dianggap sudah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.
3. Realisasi persentase jumlah desa siaga bencana tahun 2020 sebesar **14,16 %** dengan capaian **14,16 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun RPJMD 2019 yang masih kosong , maka capaiannya dianggap sudah mencapai **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2019 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.52
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020 - 2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI							
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)
1.	Persentase penurunan jumlah titik api	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	95,00
3.	Persentase jumlah desa siaga bencana	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	14,16



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi persentase penurunan jumlah titik api adalah **100,00 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
2. Realisasi tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah **95,00 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
3. Realisasi Persentase jumlah desa siaga bencana adalah **14,16 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Sedangkan perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.53
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase penurunan jumlah titik api	Realisasi	%	--	--	31,08	79,76	100,00
		Capaian	%	--	--	31,08	79,76	100,00
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Realisasi	%	--	--	20,00	24,00	95,00
		Capaian	%	--	--	20,00	24,00	95,00
3.	Persentase jumlah desa siaga bencana	Realisasi	%			35,00	110,00	14,16
		Capaian	%			35,00	110,00	14,16

Perbandingan peningkatan / penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi persentase penurunan jumlah titik api tahun 2020 sebesar **100,00 %** dengan capaian kinerja sebesar **100,00 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**31,08 %**) dan capaian tahun 2019 (**79,76 %**), maka nyata ada kenaikan yang lumayan. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan



2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

2. Realisasi tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tahun 2020 sebesar **95,00 %** dengan capaian kinerja sebesar **95,00 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**20,00 %**) dan capaian tahun 2019 (**24,24 %**), maka nyata ada kenaikan yang lumayan. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
3. Realisasi persentase jumlah desa siaga bencana sebesar **14,16 %** dengan capaian kinerja sebesar **14,16 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**35,00 %**) dan capaian tahun 2019 (**110,00 %**), maka nyata ada penurunan yang lumayan. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 13 :

Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja. sebagai berikut :

Tabel 3.54
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 13

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	%	13,13	16,52	125,82
Capaian Rata-rata					125,82%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, menunjukkan rata - rata capaian sasaran 13 " **Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan**" sebesar **125,82 %** atau masuk dalam predikat **sangat berhasil**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Rasio Kemandirian Fiskal Daerah** " **125,82** atau masuk dalam predikat **sangat berhasil**.

Sasaran Strategis 13 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien**" Pencapaian sasaran ini

dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 2.425.186.310,00** melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah (**Rp. 2.425.186.310,00**).



Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengelola beberapa jenis pajak dan retribusi daerah.
2. Posisi strategis Kab. Kotim yang memungkinkan dibangunnya pelabuhan karena adanya kawasan pesisir sehingga akses ekonomi sangat terbuka ke luar pulau, dilalui jalan negara yang merupakan Jalan Trans Kalimantan, keberadaan bandara yang masih bisa dikembangkan kedepan, hal tersebut menjadikan Sampit menjadi pintu gerbang perekonomian Kalteng.
3. Luas wilayah Kab. Kotim menjadi potensi yang besar bagi PBB-P2.
4. Keberadaan Sumber Daya Alam yang cukup banyak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan capaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar pajak dan retribusi.
2. Masih kurangnya sinergitas antar SOPD terkait.
3. Masih kurangnya komitmen SOPD pemungut dalam meningkatkan PAD.
4. Terbatasnya dana APBD untuk mendukung penyertaan modal.
5. Dilarangnya sumbangan pihak ketiga dari sector perkebunan, pertambangan dan usaha kepelabuhan, padahal hampir 1/3 dari luas wilayah Kab. Kotim merupakan areal perkebunan sawit yang merupakan objek PBB-P3 yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
6. Masih kurangnya sosialisasi.
7. Kurangnya penegakan hukum terhadap penunggak pajak dan retribusi.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belum adanya data base yang valid, sehingga belum dapat diketahui potensi yang riil.
2. Belum tersedianya Juru Sita, Pemeriksa, Penilai Pajak, dan Penyuluh Pajak yang bersertifikasi/memenuhi syarat.
3. Belum terbentuknya BUMD.
4. Masih kurangnya sarana prasarana terutama untuk menjangkau wajib pajak dan retribusi yang jauh dari kota Sampit.
5. Belum optimalnya system dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi.

Beberapa solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pemutakhiran / validasi data secara berkala.
2. Pendataan massal dan penilaian individu obyek PBB-P2.
3. Verifikasi lapangan objek pajak secara berkala.
4. Penghapusan piutang secara periodik.



5. Peningkatan mekanisme pemungutan pajak secara on line dengan mengembangkan aplikasi yang ada, sehingga mampu menjangkau wajib pajak yang jauh dari Kota Sampit serta mempermudah masyarakat dalam mengurus pajak daerah.
6. Rekonsiliasi secara intensif dengan SOPD pemungut.
7. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
8. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dan sinergitas antar SOPD.
9. Operasionalisasi BUMD.
10. Meningkatkan penjualan melalui peningkatan produksi perkebunan, pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh pemerintah.
11. Menggali sumber sumber potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap.

Tabel 3.55
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	%	---	16,52	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap hasil evaluasi RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi Rasio Kemandirian Fiskal Daerah tahun 2020 sebesar **16,52 %**. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD tahun 2019 yang kosong atau tidak ada nilainya, maka capaiannya dianggap telah mencapai **100,00 %** atau **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.56
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	16,52



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Realisasi Rasio Kemandirian Fiskal Daerah adalah **16,52 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang masih kosong nilainya, maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.57
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	Realisasi	%	--	--	11,64	12,16	16,52
		Capaian	%	--	--	94,48	96,13	125,82

Perbandingan peningkatan / penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Rasio Kemandirian Fiskal Daerah tahun 2020 sebesar **16,52 %** dengan capaian kinerja sebesar **125,82 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**94,48 %**) dan tahun 2019 (**96,13 %**), maka nyata ada kenaikan yang lumayan. Capaian tahun 2020 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 14 :

Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 4 indikator kinerja. sebagai berikut :

Tabel 3.58
PENGUKURAN CAPAIAN STRATEGIS 14

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Capaian implemmentasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	Memuaskan	Memuaskan	100,00
2.	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB	--	--
3.	Opini BPK	Opini	WTP	--	--
4.	Nilai LPPD	Nilai	Baik	--	--
Capaian Rata-rata					100,00%



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, memperlihatkan bahwa rata - rata capaian sasaran 14 " **Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah** " sebesar **100,00 %** masuk dalam predikat **berhasil** atau **memenuhi target**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Capaian implelementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)** " adalah **B** atau **Baik** atau **memuaskan** (nilai kualitatif). Capaian indikator kinerja " **Nilai akuntabilitas kinerja** " masih belum terbit hasil evaluasinya dari Kemenpan dan RB. Demikian juga dengan capaian indikator kinerja " **Opini BPK** " masih belum terbit nilainya dari BPK dan juga capaian indikator kinerja " **Nilai LPPD** " masih belum terbit nilainya dari Kemendagri.

Khusus capaian indikator kinerja **implelementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)** dengan capaian **Memuaskan** atau mendapai nilai **79**. Nilai 79 tersebut merupakan nilai rata - rata, dengan area intervensi sebagai berikut :

- Perencanaan dan Penganggaran APBD 88%
- Pengadaan Barang dan Jasa 82%
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu 81%
- Kapabilitas APIP 60%
- Manajemen ASN 79%
- Optimalisasi Pendapatan Daerah 100%
- Manajemen Aset Daerah 84%
- Tata Kelola Dana Desa 52%.

Sasaran Strategis 14 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien** ". Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Setda Kab. Kotawaringin Timur, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur dan Inspektorat Kab. Kotawaringin Timur, dengan biaya sebesar **Rp. 2.712.043.436,00** melalui dukungan beberapa program atau kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (**Rp. 2.080.961.088,00**);
2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (**Rp 72.152.456,00**);
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas (**Rp 147.539.772,00**);
4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru (**Rp. 411.390.120,00**).

Berbagai faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini sebagai berikut :

1. Dukungan unsur pimpinan sebagai pengambil keputusan, berpengaruh signifikan terhadap upaya pencapaian target kinerja.
2. Bimtek dan asistensi serta konsultasi efektif dengan fasilitator yang berkesinambungan merupakan hal yang menentukan keberhasilan.
3. Kerjasama tim yang solid, bahu membahu dan pendampingan yang intensif dari fasilitator menjadi faktor kunci keberhasilan.



4. Penguatan koordinasi dan komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung (melalui Medsos, E-Mail dll) menjadi solusi atas setiap permasalahan.
5. Tumbuhnya kesadaran (perubahan pola pikir / *mind set*) semua pihak, menjadi titik balik menuju keberhasilan, merubah paradigma tentang betapa pentingnya kinerja.
6. Terwujudnya sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga penyusunan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Pelayanan Perbendaharaan, Penatausahaan belanja Langsung dan tidak langsung serta pengelolaan kas dan dana transper berjalan dengan lancar sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan.
8. Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai entitas telah menyusun Laporan Keuangan sebanyak 5 (lima) laporan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
9. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencatatan, keberadaan, kelengkapan bukti dan nilai Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah tercatat kedalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA).
10. Terbentuknya sitem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas;

Berbagai kendala dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Koordinasi dan komunikasi antar OPD masih perlu ditingkatkan.
3. Komitmen pimpinan masih perlu ditingkatkan dalam rangka efisiensi program dan kegiatan.
4. Pengendalian intern masih perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan efisiensi program dan kegiatan, sehingga program / kegiatan yang dilaksanakan adalah yang benar - benar fokus ke tujuan dan sasaran kinerja saja.
5. Adanya perubahan regulasi menyulitkan dalam pelaksanaan kinerja.
6. Perubahan *mind set* tentang pentingnya kinerja masih belum dipahami sepenuhnya mulai unsur pimpinan sampai unsur staf / pelaksana.
7. Penerapan penyusunan penganggaran belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
8. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memenuhi substansi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan belum mencerminkan kesuaian dengan dokumen perencanaan.
9. Belum dimanfaatkannya secara optimal teknologi informasi dalam menunjang terciptanya sistem informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.



10. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana serta sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
11. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
12. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan di Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di Perangkat Daerah;
13. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi barang daerah (SIMBADA) terutama pengelola barang daerah yang kurang memahami manajemen aset daerah sehingga mengakibatkan terhambatnya inventarisasi aset daerah;

Berbagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen unsur pimpinan untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan program / kegiatan, agar yang didanai / diberikan anggaran adalah program / kegiatan yang benar - benar fokus terhadap tujuan dan sasaran kinerja saja (RPJMD Kab. Kotawaringin Timur tahun 2016 - 2021).
2. Konsentrasi pembangunan difokuskan kepada beberapa bidang saja, maksimal 5 (lima) bidang, namun dalam pelaksanaannya melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah atau SKPD.
3. Mengevaluasi kembali program / kegiatan yang tidak fokus kepada tujuan dan sasaran kinerja untuk ditinjau kembali.
4. Berkonsultasi aktif dengan fasilitator Kemenpan dan RB, agar mendapat masukan / saran perbaikan SAKIP secara berkelanjutan.
5. Melakukan sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dalam tahun anggaran;
6. Penyempurnaan Regulasi mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah melalui transparansi pengelolaan keuangan daerah;

Tabel 3.59
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Capaian implemementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	--	--	--



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
2.	Nilai akuntabilitas kinerja	Kategori	--	--	--
3.	Opini BPK	Opini	--	--	--
4.	Nilai LPPD	Kategori	--	--	--

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi capaian implemmentasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) belum terbit nilainya pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD 2019 yang masih kosong atau belum terbit nilainya, maka capaiannya belum dapat dibandingkan. Tahun 2019 tidak ada evaluasi RPJMD.
2. Realisasi nilai akuntabilitas kinerja belum terbit nilainya pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD 2019 yang masih kosong atau belum terbit nilainya, maka capaiannya belum dapat dibandingkan. Tahun 2019 tidak ada evaluasi RPJMD
3. Realisasi opini BPK belum terbit nilainya pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD 2019 yang masih kosong atau belum terbit nilainya, maka capaiannya belum dapat dibandingkan. Tahun 2019 tidak ada evaluasi RPJMD
4. Realisasi Nilai LPPD belum terbit nilainya pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD 2019 yang masih kosong atau belum terbit nilainya, maka capaiannya belum dapat dibandingkan. Tahun 2019 tidak ada evaluasi RPJMD

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.60
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Capaian implemmentasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	100,00
2.	Nilai akuntabilitas kinerja	Kategori	--	100,00	--	100,00	--	--	--	--	--
3.	Opini BPK	Opini	--	100,00	--	100,00	--	--	--	--	--
4.	Nilai LPPD	Kategori	--	100,00	--	100,00	--	--	--	--	--



Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi capaian implemementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) adalah **memuaskan** atau mencapai **100 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
2. Realisasi nilai akuntabilitas kinerja masih kosong atau belum terbit nilainya pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
3. Realisasi opini BPK masih kosong atau belum terbit nilainya pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
4. Realisasi nilai LPPD masih kosong atau belum terbit nilainya pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.61
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Capaian implemementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Realisasi	Katagori	--	--	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
		Capaian	%	--	--	100,00	100,00	100,00
2.	Nilai akuntabilitas kinerja	Realisasi	Katagori	--	--	B	B	--
		Capaian	%	--	--	100,00	100,00	--



No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
3.	Opini BPK	Realisasi	Opini	--	--	WTP	WTP	--
		Capaian	%	--	--	100,00	100,00	--
4.	Nilai LPPD	Realisasi	Kategori	--	--	Baik	Baik	--
		Capaian	%	--	--	100,00	100,00	--

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi capaian implemmentasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) tahun 2020 mendapat kategori **memuaskan** atau **Baik** atau mencapai **100,00 %**.. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**memuaskan** atau capaian **100,00 %**) dan tahun 2019 (**memuaskan** atau capaian **100,00 %**), maka tidak ada kenaikan atau penurunan. Hasil evaluasi ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
2. Realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2020 belum ada atau belum terbit nilainya. Realisasi tahun 2020 ini tentu saja belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.
3. Realisasi opini BPK tahun 2020 belum ada atau belum terbit nilainya. Realisasi tahun 2020 ini tentu saja belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.
4. Realisasi Nilai LPPD tahun 2020 belum ada atau belum terbit nilainya. Realisasi tahun 2020 ini tentu saja belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Sasaran 15 : Meningkatkan kemandirian desa

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja. sebagai berikut :

Tabel 3.62
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 15

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya status perkembangan desa	Jumlah Desa	Sangat tertinggal : 47 Tertinggal : 60 Berkembang : 45 Maju : 13 Mandiri : 3	Sangat tertinggal : 27 Tertinggal : 65 Berkembang : 59 Maju : 15 Mandiri : 2	95,79
Capaian Rata-rata					95,79%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, menunjukkan rata - rata capaian sasaran 15 " Meningkatkan kemandirian desa" sebesar **95,79 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**. Sedangkan capaian indikator kinerja " Jumlah desa



berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun) “ sebesar 95,79 % atau masuk dalam predikat berhasil atau mencapai target.

Sasaran Strategis 15 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi ” **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien**” Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 53.525.000,00** melalui beberapa program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (**Rp. 10.000.000,00**);
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (**Rp. 13.830.000,00**);
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (**Rp. 29.695.000,00**);

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa Desa yang telah mempunyai bonus demografi sebagai Ibu Kota Kecamatan atau daerah pusat ekonomi, sehingga dapat dengan cepat meningkatkan perkembangan status Desa berdasrkan IDM.
2. Terdapat dukungan dari beberapa Perangkat Daerah atau SOPD di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang ditunjukkan adanya beberapa indikator sasaran strategis daerah yang dapat mendukung pencapaian sasaran kinerja (contoh : Konektifitas jalan darat dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan dan Persentase tingkat pencemaran air).
3. Terdapat perkembangan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur yang cukup cepat, sehingga mendorong pihak perbankan untuk membuka unit-unit kerja pada Kecamatan atau Desa, serta usaha-usaha perdagangan di wilayah-wilayah yang dekat dengan perkebunan besar kelapa sawit.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sinkronisasi atau padu serasi antar Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya meningkatkan status perkembangan desa belum maksimal.
2. Kemampuan SDM perangkat Desa yang masih kurang
3. Kemampuan lembaga ekonomi Desa yang masih belum berkembang, sehingga belum mampu mendorong kemajuan ekonomi.
4. Masih ada beberapa Desa yang masih belum memiliki tenaga kesehatan dan jauh dari prasarana kesehatan.
5. Masih terdapat Desa yang dicapai melalui jalan tanah yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.

Beberapa solusi atas permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Melakukan upaya peningkatan SDM perangkat desa melalui kegiatan pelatihan / sosialisasi



2. Mendorong berkembangnya BUMDes yang telah terbentuk agar mendukung kemajuan desa
3. Memaksimalkan peran pendamping desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa agar dapat mendorong kemajuan/pembangunan di desa
4. Perlu peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah / SOPD lain guna mendukung pencapaian peningkatan status Desa terutama yang berkaitan dengan indikator penilaian IDM.

Tabel 3.63
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Jumlah Desa	---	<p>Sangat tertinggal : 27</p> <p>Tertinggal : 65</p> <p>Berkembang : 59</p> <p>Maju : 15</p> <p>Mandiri : 2</p>	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2020 sebesar **168 Desa (Total)**. Jika dibandingkan hasil evaluasi tahun RPJMD 2019 yang tidak ada nilainya, maka capaiannya dianggap **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2019 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :



Tabel 3.64
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Katagori	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	Sangat tertinggal : 27 Tertinggal : 65 Berkembang : 59 Maju : 15 Mandiri : 2 Total = 168 Desa

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun) adalah **168 Desa** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.65
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Realisasi	%	--	--	Sangat tertinggal : 55 Tertinggal : 68 Berkembang : 37 Maju : 7 Mandiri : 1 Total = 168 Desa	Sangat tertinggal : 25 Tertinggal : 77 Berkembang : 56 Maju : 8 Mandiri : 2 Total = 168 Desa	Sangat tertinggal : 27 Tertinggal : 65 Berkembang : 59 Maju : 15 Mandiri : 2 Total = 168 Desa
		Capaian	%	--	--	100%	97,18%	95,79

Sedangkan perbandingan peningkatan/penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun) sebesar **168 Desa (Total)** dengan capaian kinerja sebesar **95,79 %** tahun 2020. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**100,00 %**) dan tahun 2019 (**97,18 %**), maka nyata ada penurunan dan kenaikan sedikit. Hasil ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran



dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja. sebagai berikut :

Tabel 3.66
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 16

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	100,00
Capaian Rata-rata					100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, menunjukkan rata - rata capaian sasaran 16 " **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** " sebesar **100,00 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** " **100,00 %** atau masuk dalam predikat **berhasil** atau **mencapai target**.

Sasaran Strategis 16 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien** " Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh BPKAD, Disdukcapil, BKD, RSUD. Dr. Murjani Sampit, Dinas PMPTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan biaya sebesar **Rp 34.439.711.523,00** melalui beberapa program sebagai berikut :

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (**Rp. 2.983.881.593,00**);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (**Rp. 841.265.076,00**);

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (**Rp. 1.703.268.727,00**);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (**Rp 108.301.216,00**);

Badan Kepegawaian Daerah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (**Rp. 2.257.346.836,00**);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (**Rp. 320.852.399,00**);

RSUD dr. Murjani Sampit :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (**Rp. 16.220.068.662,00**);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (**Rp. 198.200.000,00**);



DPMPTSP :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (**Rp. 1.767.141.611,00**);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (**Rp 8.039.385.403,00**);

Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran dan indikator kinerja (BPKAD, Disdukcapil, BKD, RSUD. Dr. Murjani dan DPMPTSP) ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran, terutama untuk pembangunan jaringan nir kabel kecamatan – kecamatan.
2. SDM ASN yang terbatas, baik kualitas maupun kuantitas.
3. Fasilitas pelayanan publik tidak sepenuhnya tersedia pada semua Perangkat Daerah / SOPD (kotak saran, tempat duduk di ruang tunggu yang tidak cukup jumlahnya, tempat parkir yang aman dan nyaman serta belum ada petugas parkir khusus dll).
4. Kemampuan petugas pelayanan yang masih harus ditingkatkan, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.
5. Luasnya daerah cakupan infrastruktur.
6. Pandemi COVID-19
7. Terjadi rasionalisasi anggaran
8. Seluruh pelayanan dilaksanakan secara online
9. Jumlah operator dengan masyarakat yang dilayani secara online tidak sebanding, sehingga mengakibatkan penerbitan dokumen kependudukan yang tidak tepat waktu

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja (BPKAD, Disdukcapil, BKD, RSUD. Dr. Murjani dan DPMPTSP) ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran, terutama untuk pembangunan jaringan nir kabel kecamatan – kecamatan.
2. SDM ASN yang terbatas, baik kualitas maupun kuantitas.
3. Fasilitas pelayanan publik tidak sepenuhnya tersedia pada semua Perangkat Daerah / SOPD (kotak saran, tempat duduk di ruang tunggu yang tidak cukup jumlahnya, tempat parkir yang aman dan nyaman serta belum ada petugas parkir khusus dll).
4. Kemampuan petugas pelayanan yang masih harus ditingkatkan, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.
5. Dialokasikannya Dana DAK Non Fisik dari pusat sejak tahun 2017 untuk kegiatan pelayanan keliling.
6. Adanya kegiatan jemput bola ke Desa/Kelurahan dan Se Kecamatan dan Se Kabupaten.
7. Diterapkannya TTE.
8. Diterapkannya inovasi pelayanan 3 in 1.
9. Dijalinnnya kerjasama dengan perangkat daerah dalam hal pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Adanya aplikasi pelaporan secara online yang memudahkan perusahaan dalam mengajukan pelaporan tanpa harus mengirim secara manual kepada DPMPTSP.



11. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan prima ini sangat berdampak pada kepuasan pengguna layanan pada DPMPSTP.

Beberapa solusi atas permasalahan atau kegagalan pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini (BPKAD, Disdukcapil, BKD, RSUD. Dr. Murjani dan DPMPSTP) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan melalui Diklat teknis dan Diklat kepribadian.
2. Meningkatkan prosedur pelayanan agar masyarakat dapat menjadikan Perangkat Daerah / SOPD sebagai pusat pelayanan publik yang baik.
3. Menyederhanakan persyaratan pelayanan publik yang diberikan dan mempercepat pelayanan.
4. Menempatkan petugas pelayanan yang tepat dan memiliki disiplin yang tinggi (memahami tugasnya sepenuhnya).
5. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif dan memiliki etika / sopan santun.
6. Terus menerus menyempurnakan sistem dan petugas pelayanan serta terus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani.
7. Mengalokasikan dana untuk pengembangan *website* dan pelayanan *online*.

Tabel 3.67
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	---	Baik	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 masuk katagori **Baik**. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD 2019 yang masih kosong, maka capaiannya dianggap **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :



Tabel 3.68
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Kategori	--	100,00	--	100,00	--	Baik	--	100,00	Baik

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah **Baik** atau **100 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.69
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Realisasi	Kategori	--	--	Baik	Baik	Baik
		Capaian	%	--	--	100	100	100

Perbandingan peningkatan / penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 adalah **baik %** dengan capaian kinerja sebesar **100,00 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**100,00 %**) dan tahun 2019 (**100,00 %**), maka tidak ada penurunan / kenaikan. Hasil ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 17 :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 3 indikator kinerja. sebagai berikut :



Tabel 3.70
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 17

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6,98	3,86	55,30
2.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	9,40	5,11	54,36
3.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,61	9,39	109,06
Capaian Rata-rata					72,91%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, menunjukkan rata - rata capaian sasaran 17 " **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan**" sebesar **72,91 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **tidak mencapai target**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** " **55,30 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **belum mencapai target**. Capaian indikator kinerja " **Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan** " **54,36 %** atau masuk dalam predikat **kurang berhasil** atau **tidak mencapai target**. Capaian indikator kinerja " **Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** " **109,06 %** atau masuk dalam predikat **sangat berhasil**.

Sasaran Strategis 17 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya** " Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan biaya sebesar **Rp. 4.065.585.360,00** melalui beberapa program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas SDM dan SDA Pertanian Berwawasan Lingkungan (**Rp. 18.004.000,00**);
2. Program pengembangan industri kecil dan menengah (**Rp. 397.888.360,00**);
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (**Rp. 3.649.693.000,00**);

Berbagai faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini sebagai berikut :

1. Indikator kinerja merupakan keluaran dari program - program teknis yang saling mendukung satu dengan lainnya.
2. Program - program pendukung dilaksanakan sesuai dengan skedul, identifikasi lokasi, sosialisasi, penyebaran komoditi (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan).



3. Adanya dukungan sarana dan prasarana (Alsintan, infrastruktur lahan), pelatihan petani, penghitungan angka produktifitas serta pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan (Juknis).
4. SDM pengelola tersedia dalam jumlah yang cukup dan memiliki kompetensi yang memadai.
5. Permintaan pasar yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini sebagai berikut :

1. Banyak lahan potensi dan lahan pertanian yang ada (*existing*) masuk dalam kawasan hutan produksi.
2. Tingkat kehilangan hasil panen dan pasca panen relatif masih tinggi.
3. Perilaku (pendidikan, sikap, kemampuan dan keterampilan) petani yang dirasakan sulit berinteraksi dengan teknologi yang dianjurkan dan informasi pasar
4. Kecenderungan untuk mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan.
5. Manajemen usaha tani dan kualitas produk relatif rendah, sehingga kalah bersaing dengan produk yang masuk dari luar daerah.
6. Beralihnya fungsi lahan pertanian yang potensial untuk kemudian dijadikan areal tanaman kelapa sawit.
7. Belum disahkannya RTRWP sehingga terkendala untuk perluasan areal tanam khususnya di daerah yang termasuk kawasan hutan produksi.
8. Kurangnya minat pengrajin untuk mengikuti kegiatan (exspo, studi banding dll).
9. Penganggaran yang disediakan tidak mencukupi, sehingga program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran tidak maksimal hasilnya.
10. Kurangnya dukungan masyarakat.
11. Kurangnya tenaga nara sumber dari pihak ASN.

Solusi atas berbagai masalah / kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja antara lain :

1. Mendorong dan mempercepat terbitnya Perda mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dimana telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan BPTP Prov Kalteng yang didanai dari APBD Kabupaten.
2. Mendorong adanya kepastian hukum bagi petani pemilik lahan untuk masuk dalam program pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan Lahan Pertanian.
3. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan dibidang pertanian dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memotivasi petanidalam berusaha.
4. Menggali potensi investasi dan memfasilitasi kegiatan temu usaha dalam rangka menarik minat investor dan mengembangkan pola kemitraan dan perkreditan.



5. Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) dan Perluasan Areal Tanaman (PAT) akan terus dilakukan untuk meningkatkan luas areal tanam dan produktivitas tanaman pangan
6. Sosialisasi penggunaan pupuk organik alternatif untuk mendorong petani di pedesaan memanfaatkan bahan organik yang tersedia dalam mengantisipasi kurang lancarnya pelayanan saprodi, terutama pupuk.
7. Mengintensifkan pelatihan, pembinaan dan bimbingan UPJA.
8. Menggali potensi investasi dan memfasilitasi kegiatan temu usaha dalam rangka menarik minat investor dan mengembangkan pola kemitraan dan perkreditan.
9. Mengupayakan peningkatan kinerja petugas lapangan melalui pengembangan pola penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan peningkatan kemampuan penyuluh.
10. Optimalisasi lembaga perbenihan yang ada UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Kebun Bibit Hortikultura (KBH) Pelantaran dan mendorong berkembangnya penangkaran benih di lokasi-lokasi potensial.
11. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan terhadap penerapan teknologi panen dan pasca panen.
12. Mengintensifkan pembinaan terhadap kelompok tani penerima kredit atau penerima Bansos / BPLM lama / baru dalam rangka lancarnya perguliran dana bantuan tersebut.
13. Perlu Diklat bagi ASN yang membidangi industri pengolahan, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Tabel 3.71
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	--	3,86	100,00
2.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	--	5,11	100,00
3.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	--	9,39	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap akhir periode RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2020 sebesar **3,86%** dengan capaian **100,00 %**. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun RPJMD 2019 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya sebesar **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.



2. Realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan tahun 2020 sebesar **5,11 %**. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun RPJMD 2019 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya sebesar **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.
3. Realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2020 sebesar **9,39** dengan capaian **100,00 %**. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi RPJMD tahun 2019 yang kosong nilainya, maka dianggap capaiannya sebesar **100,00 %** atau masuk predikat **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.72
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								Realisasi Tahun 2020
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	
1.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	3,86
2.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	5,11
3.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	9,39

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah **3,86 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
2. Realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan adalah **5,11 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.
3. Realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah **9,39 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan



dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Sebagai perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.73
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Realisasi	%	--	--	6,90	7,13	3,86
		Capaian	%	--	--	113,86	111,23	55,30
2.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Realisasi	%	--	--	27,16	-0,69	5,11
		Capaian	%	--	--	308,64	-7,57	54,36
3.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Realisasi	%	--	--	7,81	6,08	9,39
		Capaian	%	--	--	96,78	72,99	109,06

Perbandingan peningkatan/penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2020 sebesar **3,86 %** dengan capaian kinerja sebesar **55,30 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**113,86 %**) dan tahun 2019 (**111,23 %**), maka nyata ada penurunan. Hasil ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
2. Realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sebesar **5,11 %** dengan capaian kinerja sebesar **54,36 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**308,64 %**) dan tahun 2019 (**-7,57 %**), maka ada penurunan yang signifikan. Hasil ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.
3. Realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar **9,39 %** dengan capaian kinerja sebesar **109,06 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**96,78 %**) dan tahun 2019 (**72,99 %**), maka ada penurunan sedikit. Hasil ini belum bisa dibandingkan dengan



tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 18 : Meningkatnya investasi di daerah

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja. sebagai berikut :

Tabel 3.74
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 18

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	24,97	132,46	530,48
Capaian Rata-rata					530,48%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, menunjukkan rata - rata capaian sasaran 18 " **Meningkatnya investasi di daerah**" sebesar **530,48 %** atau masuk dalam predikat **sangat berhasil** atau **melampau target**. Sedangkan capaian indikator kinerja " **Persentase pertumbuhan nilai investasi** " mencapai **530,48 %** atau masuk dalam predikat **sangat berhasil** atau **melampau target**.

Sasaran Strategis 18 ini merupakan upaya untuk mewujudkan Misi " **Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya**" Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 227.725.000,00** melalui program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (**Rp. 227.725.000,00**) sebagai berikut :

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan system informasi teknologi untuk perizinan daerah dan pembuatan data base potensi.
2. Kepatuhan perusahaan dalam memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana secara total jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM pada Tahun 2018 sebanyak 105 perusahaan menjadi 202 perusahaan, atau meningkat sebanyak 92%. Salah satu factor pendukung adalah surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)RI kepada seluruh perusahaan yg terdaftar berupa himbauan sampai dengan ancaman pencabutan perizinan;



3. Adanya Pelatihan / Diklat LKPM online yang dilaksanakan pada bulan september 2019 kepada perusahaan dan aparaturnya juga menjadikan factor pendukung keberhasilan, dimana dengan pelatihan tersebut menjadi informasi kepada perusahaan tata cara pengisian pelaporan yang benar sesuai dengan peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Adanya aplikasi secara pelaporan secara online yang memudahkan perusahaan dalam mengajukan pelaporan tanpa harus mengirim secara manual kepada instansi terkait;
5. Peningkatan kemampuan aparaturnya dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan SOP secara tertib dan teratur serta komitmen dalam melayani masyarakat sesuai dengan pelaksanaan pelayanan prima ini sangat berdampak pada kepuasan pengguna layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peningkatan kegiatan promosi secara regional, nasional dan internasional.
7. Meningkatkan kerjasama dan fasilitator kemitraan antara UMKM dan PMA/PMDN.
8. Meningkatkan daya saing para pelaku usaha daerah.
9. Perbaikan iklim penanaman modal.
10. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara pelayanan.
11. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan.
13. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan secara efisien dan efektif.
14. Meningkatkan Pendapatan Daerah seiring dengan tumbuhnya investasi dan terbukanya banyak lapangan pekerjaan.
15. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah personil aparaturnya DPMPSTP dan kompetensi teknisnya.
2. Jaringan Internet yang belum stabil.
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan diiringi dengan peluncuran aplikasi perizinan terbaru yang sebelumnya menggunakan SPIPISE menjadi aplikasi OSS, perubahan aplikasi ini menjadikan pelaku usaha dan aparaturnya memerlukan proses untuk penyesuaian maupun pembelajaran, salah satu kelemahan dari aplikasi ini belum menyediakan fitur pelaporan/rekap perizinan, sehingga untuk menarik data investasi masih bersifat manual (*copy paste*);
4. Menurunnya nilai investasi per triwulan ke-3 menurut data BKPM mencapai 67%, data tersebut berdasarkan pencatatan resmi LKPM oleh BKPM, sedangkan data triwulan ke-4 masih dalam proses rekapitulasi di BKPM RI. Salah satu faktor menurunnya nilai investasi ini dikarenakan perusahaan disektor pertanian khususnya perkebunan mengalami penurunan penjualan dikarenakan harga Minyak CPO yang turun drastic



dipasaran dunia. Hal ini sangat berpengaruh untuk perusahaan menunda perluasan atau menambah nilai investasi perkebunan yang ada;

5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mengatur tentang pelaporan investasi membatasi masa pelaporan, dimana setelah masa pelaporan terlewati laporan yang dikirim oleh perusahaan tidak diakui / tidak direkap oleh BKPM RI, dan juga adanya revisi/perbaikan laporan yang diminta oleh BKPM RI tidak dilanjutkan / diperbaiki dari pihak perusahaan sehingga nilai rekap yang dipublish oleh BKPM RI menjadi berkurang dibandingkan nilai perusahaan yang dilaporkan pada periode tersebut;
6. Pihak perusahaan dalam memberikan pelaporan LKPM masih takut dengan keterkaitan nilai investasi dengan perpajakan sehingga pelaporan nilai investasi dibuat sekecil mungkin untuk menghindari pajak, padahal pelaporan Nilai investasi tidak menjadi rujukan dalam perhitungan pajak perusahaan;
7. Perusahaan Kecil dan Menengah masih kurang tingkat kepatuhan dalam memberikan Laporan Nilai investasi (LKPM) sehingga potensi nilai investasi masih sedikit.
8. Luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur mengakibatkan informasi yang lambat.
9. Cepatnya perubahan peraturan dan perundang-undangan.

Beberapa solusi atas masalah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan khususnya pelaporan LKPM;
2. Mencari sumber potensi / peluang baru pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Konsultasi dan koordinasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI agar dalam rekapitulasi diberikan kelonggaran waktu dan koordinasi dengan aparatur di daerah;
4. Memberikan penjelasan kepada pihak perusahaan antara laporan investasi dan perpajakan;
5. Sosialisasi kebijakan dan peraturan bidang penanaman modal kepada pelaku usaha.
6. Terpenuhi jumlah personil aparatur yang diperlukan
7. Tingginya motivasi dan etos kerja personil DPMPSTP
8. Adanya system informasi (Website, dan pengaduan online)
9. Jaringan Internet yang stabil
10. Terpenuhi sarana pendukung gedung
11. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja/instansi teknis sesuai kewenangan yang ada guna mendukung pelaksanaan penanaman modal.
12. Meningkatkan pelayanan mobile terhadap pelaku usaha.



Tabel 3.75
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN HASIL EVALUASI RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	---	132,46	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat, realisasi tahun 2020 terhadap hasil evaluasi RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan nilai investasi tahun 2020 sebesar **132,46 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang masih kosong atau belum ada nilainya, maka dianggap capaiannya sudah **100,00 %** atau masuk katagori **berhasil**.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :

Tabel 3.76
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								Realisasi Tahun 2020
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	
1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	--	100,00	--	100,00	--	100,00	--	100,00	132,46

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi persentase pertumbuhan nilai investasi adalah **132,46 %** pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kosong nilainya maka dianggap capaiannya sudah **100,00 %**. Target RPJMN tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang tidak ada nilainya atau kosong ini, terjadi karena indikator tersebut tidak ditemukan yang sama atau hampir sama atau mendekati, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.77
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Realisasi	%	--	--	67,00	48,34	132,46
		Capaian	%	--	--	281,75	203,28	530,48

Perbandingan peningkatan / penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi persentase pertumbuhan nilai investasi tahun 2020 sebesar **132,46 %** dengan capaian kinerja sebesar **530,48 %**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (**281,75 %**) dan tahun 2019 (**203,28 %**), maka nyata ada penurunan yang lumayan. Hasil ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 karena adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 atau perubahan RPJMD yang pertama setelah tiga tahun berjalan.

Sasaran 19 :

Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja. sebagai berikut :

Tabel 3.78
PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 19

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	%	1,39	N/A**	-
Capaian Rata-rata					-

Pengukuran kinerja sasaran 19 tersebut di atas tidak bisa dilakukan karena data realisasi **belum bisa diterbitkan** oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur. Diinformasikan bahwa data dimaksud baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021.

Sasaran Strategis 19 ini merupakan upaya untuk mewujudkan atau merealisasi Misi " **Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya** " Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dengan biaya sebesar **Rp. 24.817.159.950,00** melalui beberapa program sebagai berikut :

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata (**Rp. 68.275.000,00**);
2. Program pengembangan destinasi pariwisata (**Rp. 24.748.884.950,00**);



Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Menjadi Program Prioritas Daerah sehingga beberapa arah kebijakan dapat dijabarkan melalui Program Kegiatan Dinas
2. Ditetapkannya Peraturan Kepariwisata dan Budaya (UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No.5 Thn 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, PP No. 66 tahun 2015 tentang Museum, Perda RIPPERDA No 02 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Kepariwisata Perda No.12 Tahun 2013 tentang Kepariwisata)
3. Adanya Potensi Wisata Alam, Budaya dan Buatan
4. Relatif tersedia / terseleggaranya Atraksi, Amenetas dan Aksesibilitas oleh Pemerintah maupun Swasta
5. Promosi yang di laksanakan secara terus menerus dalam kontilasi lokal, regional dan nasional
6. Pengembangan, Pembangunan, Peningkatan Destinasi – destinasi baik dilakukan Pemerintah maupun swasta
7. Berkembangnya Sanggar – sanggar Kesenian baik jumlah maupun kualitas
8. Terbentuknya Pelaku Industri Pariwisata (HPI, ASITA, PHRI) dan Ekonomi Kreatif serta Pelaku Budaya dan Seni
9. Sudah tersusunnya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2019 sebagai acuan pelaksanaan dan kewenangan dan pembiayaan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi iklim yang ekstrim dan pembangunan sektor lainnya sehingga mempengaruhi penerimaan PAD
2. Keterbatasan anggaran sehingga event yang ditetapkan tidak sesuai dengan jumlah event dan jadwal yang ditetapkan
3. Belum sinergi jadwal pelaksanaan Event antar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah khususnya
4. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
5. Kegiatan Event yang dilaksanakan jadwalnya tidak tetap setiap tahunnya hal ini dikarenakan sebagian besar event dianggarkan di perubahan
6. Belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan terhadap Pelaku Usaha Kepariwisata dan Budaya secara terintegrasi
7. Berdasarkan hasil lapangan, belum terinventarisasi / tercatat semua Kebudayaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur
8. Belum terintegrasinya Program Kegiatan SOPD terkait dalam melaksanakan Program Kegiatan yang mendukung sektor pariwisata

Beberapa solusi atas masalah dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Pemkab Kotim melaksanakan pengembangan Destinasi Wisata secara komprehensif dan berupaya meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk dukungan pembiayaan baik melalui TP, DAK maupun Intervensi bantuan Pemerintah
2. Melakukan koordinasi dan co management lintas SOPD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan Program Kegiatan untuk pengembangan, efektifitas dan optimalisasi atraksi, amenities dan aksesibilitas
3. Pokok – pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2018 akan ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim dan usulan penetapan Perda untuk optimalisasi dalam pelaksanaan Kewenangan dan Penganggaran baik daerah maupun pusat
4. Pemerintah melalui Disbudpar berupaya melaksanakan pembinaan Budaya / Seni dengan memberikan bantuan berupa peralatan kesenian
5. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang budaya dan pariwisata serta pembinaan kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan
6. Serta mengirim perwakilan duta budaya dan seni tingkat provinsi dan tingkat nasional

Tabel 3.79
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
			AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2019	TAHUN 2020	CAPAIAN
1.	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	%	--	N/A**	--

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2020 terhadap hasil evaluasi RPJMD 2019 sebagai berikut :

1. Realisasi Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB tahun 2019 tidak dapat disajikan atau dibandingkan, karena data / nilai realisasi **belum bisa diterbitkan** oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur. Diinformasikan bahwa data dimaksud baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021.

Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam, capaian indikator kinerja tahun 2020 perlu dibandingkan dengan standar atau target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dan RPJMN tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan terhadap indikator yang sama atau hampir sama atau mendekati, sebagai berikut :



Tabel 3.80
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RPJMN TAHUN 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI								
			Target RPJMN Tahun 2017	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2018	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2019	Capaian (%)	Target RPJMN Tahun 2020	Capaian (%)	Realisasi Tahun 2020
1.	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	%	--	--	--	--	--	N/A**	--	--	N/A*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisis sebagai :

1. Realisasi Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB tahun 2020 tidak ada atau kosong nilai / datanya. Pengukuran indikator kinerja tersebut di atas tidak bisa dilakukan karena data / nilai realisasi **belum bisa diterbitkan** oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur. Diinformasikan bahwa data dimaksud baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021.

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.81
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	SATUAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	Realisasi	%	--	--	N/A**	N/A**	N/A**
		Capaian	%	--	--	-	-	-

Perbandingan peningkatan / penurunan realisasi capaian kinerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena data realisasi **belum bisa diterbitkan** oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur. Diinformasikan bahwa data dimaksud baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2021.



C. Akuntabilitas Keuangan

Secara komprehensif, akuntabilitas keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah Tahun 2020.

Sebagaimana tahun-tahun anggaran sebelumnya, pendanaan pembangunan pada tahun anggaran 2020 juga berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli daerah :

- Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan :

- Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

- Pendapatan Hibah
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- Pendapatan Lainnya

Di sisi lain, sebagai pelaksanaan tugas pemerintah daerah baik itu tugas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yaitu tugas desentralisasi, tugas selaku wakil pemerintah di daerah yaitu tugas dekonsentrasi dan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah yaitu tugas pembantuan, disertai juga dengan pendanaannya.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengacu pada kaidah - kaidah mengenai proses penyusunan APBD yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Lebih jauh lagi, dalam penyusunan APBD harus juga memperhatikan beberapa prinsip dalam disiplin anggaran, antara lain:



- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD / Perubahan APBD;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum daerah.

Oleh karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil, dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pada prinsipnya APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, sehingga secara ideal belanja yang direncanakan tidak boleh melebihi pendapatan yang ditargetkan. Namun demikian, dengan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD defisit anggaran dalam batas tertentu dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan catatan dapat ditutupi dari sumber-sumber yang lain dengan tidak melanggar peraturan perundang - undangan yang ada.

2. Pendapatan Daerah

Dalam menentukan arah pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan 3 (tiga) strategi :

- a. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara intensif dan ekstensif.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia / petugas pengelola pendapatan daerah.
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak maupun retribusi.

Dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara intensif dan ekstensif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Intensifikasi

- a) Bidang Personil
 - Upaya intensifikasi bidang personil yaitu memberikan kesempatan yang seluas - luasnya bagi personil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti kursus Perpajakan, Keuangan Daerah, dan lain sebagainya.
 - Mengadakan pelatihan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi petugas baik di tingkat Kelurahan, Desa, maupun RT.
- b) Bidang Sarana dan Prasarana
 - Untuk menunjang pengembangan daya dukung operasional di daerah Kecamatan dan Dinas Instansi dalam rangka pungutan Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerima, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Pungut yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.

- Pembangunan Manual Pendapatan Asli Daerah (MAPATDA) yang didukung dengan menggunakan system LAN (*Local Area Network*).
 - Pembaharuan (*up date*) data wajib pajak dan wajib retribusi baik yang berada di wilayah Kecamatan sampai pedesaan secara berkala.
 - Meningkatkan sistem dan prosedur pungutan penerimaan dari Dinas / Unit / Satuan Kerja sampai Kecamatan di lingkungan Kab. Kotawaringin Timur.
- c) Meninjau kembali dan menyiapkan perubahan / penyempurnaan Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaannya yang sudah berlaku 5 (lima) tahun ke atas.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi dengan meningkatkan penegakan di Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

- Menggali potensi pendapatan daerah pada masing-masing Dinas / Unit / Satuan Kerja sampai Kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Memanfaatkan sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien. Dalam pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah harus betul-betul selektif dengan memperhitungkan nilai ekonomis suatu kegiatan, dengan kata lain harus mempunyai dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini senapas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Menumbuh kembangkan kesadaran dan peran serta masyarakat guna memenuhi kewajiban. Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembangunan Manusia Berkelanjutan dan kita sepakat untuk itu bahwa pembangunan harus tetap dilanjutkan dan berkesinambungan namun harus kita sadari pula perlu dicari sumber dana untuk menunjang pembangunan dan diharapkan pendanaan berasal dari masyarakat. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya terhadap pembayaran Pajak/Retribusi sangat diperlukan. Untuk menggugah masyarakat pentingnya kesadaran terhadap kewajibannya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengadakan penyuluhan secara berkesinambungan dengan kerjasama lintas sektoral.



Data Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.82
ANGGARAN DAN REALISASI APBD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN	1.858.735.691.974,00	1.553.611.230.701,51	83,58
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	418.095.783.674,00	232.885.271.170,53	55,70
	1) Pajak Daerah	265.329.103.951,00	66.053.008.127,00	24,89
	2) Retribusi Daerah	12.719.779.033,00	11.020.245.446,50	86,64
	3) Pendpt. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	8.595.948.859,00	8.595.948.859,00	100,00
	4) Lain-Lain PAD yang sah	131.450.951.831,00	147.216.068.738,03	111,99
	2. PENDAPATAN TRANSFER	1.195.117.903.300,00	1.162.794.042.143,98	97,30
	1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.045.078.758.000,00	1.044.742.379.194,00	99,97
	(1) Dana Bagi Hasil Pajak	58.086.341.000,00	45.948.877.470,00	79,10
	(2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sb.Dy. Alam)	34.642.804.000,00	47.266.965.170,00	136,44
	(3) Dana Alokasi Umum	772.439.994.000,00	770.071.494.000,00	99,69
	(4) Dana Alokasi Khusus	179.909.619.000,00	181.455.042.554,00	100,86
	2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28.297.573.000,00	28.297.831.000,00	100,00
	(1) Dana Penyesuaian	28.297.573.000,00	28.297.831.000,00	100,00
	3) Transfer Pemerintah Provinsi	121.741.572.300,00	89.753.831.949,98	73,72
	(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.741.572.300,00	89.753.831.949,98	73,72
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	245.522.005.000,00	157.931.917.387,00	64,32
	1) Pendapatan Hibah	87.522.620.000,00	0,00	0,00
	2) Pendapatan Lainnya	157.999.385.000,00	157.931.917.387,00	99,96
II.	BELANJA	1.707.387.871.297,00	1.365.469.763.360,78	79,97
	1. BELANJA OPERASI	1.282.895.561.263,00	1.047.852.501.917,78	81,68
	1) Belanja Pegawai	596.410.662.051,00	542.079.537.068,00	90,89
	2) Belanja Barang	567.658.036.247,00	422.183.829.936,78	74,37
	3) Belanja Hibah	114.200.384.812,00	79.864.906.818,00	69,93
	4) Belanja Bantuan Sosial	4.626.478.153,00	3.724.228.095,00	80,50



No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	2. BELANJA MODAL	389.677.881.634,00	283.349.837.489,00	72,71
	1) Belanja Tanah	428.750.000,00	386.000.000,00	90,03
	2) Belanja Peralatan dan Mesin	60.976.820.932,00	46.868.724.590,00	76,86
	3) Belanja Bangunan dan Gedung	180.648.027.626,00	118.949.579.168,00	65,85
	4) Belanja Jln, Irigasi dan Jaringan	146.351.878.076,00	115.896.162.631,00	79,19
	5) Belanja Aset Tetap Lainnya	1.272.405.000,00	1.249.371.100,00	98,19
	3. BELANJA TIDAK TERDUGA	34.814.428.400,00	34.267.423.954,00	98,43
	1) Belanja Tidak Terduga	34.814.428.400,00	34.267.423.954,00	98,43
III.	TRANSFER	257.614.248.229,00	231.603.592.316,00	89,90
	1. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	9.528.875.183,00	0,00	0,00
	(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.500.000.000,00	0,00	0,00
	(2) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.028.875.183,00	0,00	0,00
	2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	248.085.373.046,00	231.603.592.316,00	93,36
	(1) Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00
	(2) Bantuan Keuangan ke Desa	247.030.727.300,00	230.548.946.570,00	93,33
	(3) Bantuan Keuangan Lainnya	809.645.746,00	809.645.746,00	100,00
IV.	SURPLUS / DEFISIT	(106.266.427.552,00)	(43.462.124.975,27)	40,90
	PEMBIAYAAN			
	1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	211.545.776.170,45	211.545.776.170,45	100,00
	1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	211.545.776.170,45	211.545.776.170,45	100,00
	2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00
	1) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	13.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	198.545.776.170,45	203.545.776.170,45	102,52
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	92.279.348.618,45	160.083.651.195,18	173,48

Secara umum dari data anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut menunjukkan bahwa penganggaran pada tahun 2020 terjadi defisit sebesar **Rp 106.266.427.552,00** namun pada saat realisasi terjadi penurunan defisit menjadi sebesar **Rp. 43.462.124.975,27**

Selain itu pada tahun 2020 juga dianggarkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar **Rp. 92.279.348.618,45** dengan realisasi penggunaan SILPA tahun lalu sebesar **Rp. 160.083.651.195,18** atau **173,48 %**.



Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan pendapatan tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 1.553.611.230.701,51** yang mana realisasi penerimaan pendapatan tersebut mencapai **83,58 %** atau memenuhi target dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 1.858.735.691.974,00**

Dari segi komposisi realisasi pendapatan, dana perimbangan masih merupakan komponen utama, yaitu sebesar **Rp. 1.224.889.582.116,00** atau **95,36 %** dari realisasi pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebesar **Rp 1.553.611.230.701,51**

Dari dana perimbangan tersebut, DAU menjadi komponen yang terbesar sebesar **Rp. 772.439.994.000,00** atau **99,69 %** dari total pendapatan tahun 2020.

Sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar **Rp 232.885.271.170,53** atau **55,70 %** dari jumlah total realisasi pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.

Berkaitan dengan belanja daerah, realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar **79,97 %** dari anggarannya, yaitu dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp. 1.707.387.871.297,00** terealisasi hanya sebesar **Rp. 1.365.469.763.360,78** Dari jumlah realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2020 yang sebesar **Rp. 1.365.469.763.360,78** terdapat sebanyak **72,71 %** atau sebesar **Rp. 283.349.837.489,00** diantaranya merupakan belanja modal untuk menambah aset daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2020 selain bersumber dana APBD Kabupaten Kotawaringin Timur, juga terdapat kegiatan - kegiatan yang bersumber dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga bersumber dana APBN yang diterima dan dikelola langsung oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ilustrasi secara spesifik pembiayaan melalui APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 yang dipergunakan untuk mencapai atau mendukung setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel :



Tabel 3.83
PENCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,02	69,85	99,76	31.757.241.063,00	21.667.236.784,00	68,23
Capaian Rata-Rata							99,76	Capaian Rata-Rata		68,23
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,72	8,72	100,00	38.251.792.930,00	31.578.694.860,00	82,55
		2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,62	100,00	752.671.185,00	723.037.166,00	96,06
Capaian Rata-Rata							100,00	Capaian Rata-Rata		82,82
3	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	1	Persentase angkatan kerja terampil/terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	%	34,58	39,00	112,78	47.541.500,00	47.506.250,00	99,93
Capaian Rata-Rata							112,78	Capaian Rata-Rata		99,93
4	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,93	87,91	99,98	106.755.000,00	101.675.000,00	95,24
		2	Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	0,009	0,006	66,67	28.290.000,00	28.290.000,00	100,00
Capaian Rata-Rata							83,32	Capaian Rata-Rata		96,24



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	1.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,00	50,93	101,86	1.109.448.089,00	980.328.735,00	88,36
		2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	47,00	46,82	99,62			
		3.	Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	94,00	92,86	98,79	101.765.447.326,00	79.951.520.901,00	78,56
		4.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	127	130	102,36	141.392.500,00	141.382.550,00	99,99
Capaian Rata-Rata							100,66	Capaian Rata-Rata		88,97
6.	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	1.	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	97,65	96,10	98,41	598.125.000,00	95.035.000,00	15,89
		2.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	93,00	85,70	92,15			
Capaian Rata-Rata							95,28	Capaian Rata-Rata		15,89
7.	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	1.	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	64,00	45,72	71,44	2.347.325.098,00	--	--
		2.	Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	95,00	85,39	89,88	13.300.000,00	--	--
Capaian Rata-Rata							80,66	Capaian Rata-Rata		--
8	Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	79,72	N/A**	--	989.749.000,00	974.940.000,00	98,50
Capaian Rata-Rata							--	Capaian Rata-Rata		98,50
9	Menguatnya perekonomian rakyat	1.	Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	9	6,61	73,44	113.490.000,00	112.790.000,00	99,38
		2.	Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	3	0,14	4,67			
Capaian Rata-Rata							39,06	Capaian Rata-Rata		99,38



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Menurunnya pencemaran lingkungan	1. Indeks tingkat pencemaran air	Indeks	4,80	3,33	69,38	56.977.000,00	56.977.000,00	100,00
		2. Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	56,00	54,00	96,43	2.643.516.500,00	2.179.371.973,00	82,44
		3. Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	Indeks	66,70	41,80	62,67	54.889.000,00	54.410.495,00	99,13
Capaian Rata-Rata						76,16	Capaian Rata-Rata		83,14
11	Meningkatnya kualitas ruang publik	1. Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	80,62	11,86	14,71	2.587.686.141,00	2.561.208.193,00	98,98
		2. Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	ha	43,42	-	-	15.470.000,00	15.185.500,00	98,16
Capaian Rata-Rata						14,71	Capaian Rata-Rata		98,97
12	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	1. Persentase penurunan jumlah titik api	%	100	100	100,00	12.000.000.000,00	10.527.640.217,00	87,73
		2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	95	95,00	2.059.771.792,00	1.947.857.831,00	94,57
		3. Persentase jumlah desa siaga bencana	%	100	14,16	14,16	--	--	--
Capaian Rata-Rata						97,50	Capaian Rata-Rata		88,73
13	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	%	13,13	16,52	125,82	2.535.889.500,00	2.425.186.310,00	95,63
Capaian Rata-Rata						125,82	Capaian Rata-Rata		95,63



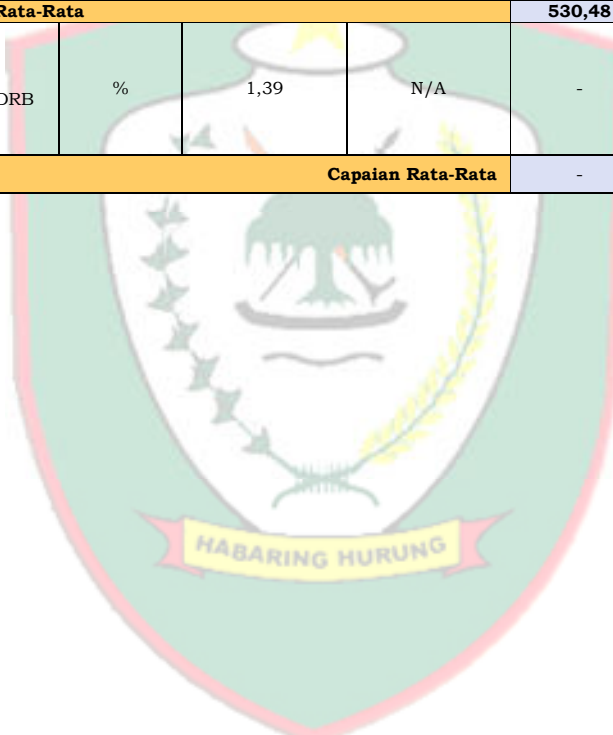
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	1. Capaian implemementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	Memuaskan	Memuaskan	100,00	8.628.555.100,00	2.080.961.088,00	24,12
		2. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB	B	100,00	86.967.932,00	72.152.456,00	82,96
		3. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	341.422.750,00	147.539.772,00	43,21
		4. Nilai LPPD	Nilai	Baik	Baik	100,00	432.004.834,00	411.390.120,00	95,23
Capaian Rata-Rata						100,00	Capaian Rata-Rata		61,38
15	Meningkatnya status perkembangan desa	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Jumlah Desa	Sangat tertinggal : 47 Tertinggal : 60 Berkembang : 45 Maju : 13 Mandiri : 3	Sangat tertinggal : 27 Tertinggal : 65 Berkembang : 59 Maju : 15 Mandiri : 2	95,79	53.525.000,00	53.525.000,00	100,00
Capaian Rata-Rata						95,79	Capaian Rata-Rata		100,00
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	100,00	54.758.197.251,00	34.439.711.523,00	86,00
Capaian Rata-Rata						100,00	Capaian Rata-Rata		86,00
17	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6,98	3,86	55,30	28.229.000,00	18.004.000,00	63,78
		2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	9,40	5,11	54,36	397.915.000,00	397.888.360,00	99,99
		3. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,61	9,39	109,06	3.805.518.903,00	3.649.693.000,00	95,91
Capaian Rata-Rata						72,91	Capaian Rata-Rata		96,08



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

*Habaring
Hurung*

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	PAGU	REALISASI	CAPAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Meningkatnya investasi di daerah	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	24,97	132,46	530,48	235.970.000,00	227.725.000,00	96,51
Capaian Rata-Rata						530,48	Capaian Rata-Rata		96,51
19	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	%	1,39	N/A	-	24.941.867.140,00	24.817.159.950,00	99,50
Capaian Rata-Rata						-	Capaian Rata-Rata		99,50





Adapun pagu dan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis atau Sasaran Kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.84
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2020

No.	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN	
			REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	31.757.241.063,00	21.667.236.784,00	68,23
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	39.004.464.115,00	32.301.732.026,00	82,82
3.	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	47.541.500,00	47.506.250,00	99,93
4.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	135.045.000,00	129.965.000,00	96,24
5.	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	103.016.287.915,00	81.073.232.186,00	88,97
6.	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	598.125.000,00	95.035.000,00	15,89
7.	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	2.360.625.098,00	0,00	0,00
8.	Meningkatnya kesejahteraan petani	989.749.000,00	974.940.000,00	98,50
9.	Menguatnya perekonomian rakyat	113.490.000,00	112.790.000,00	99,38
10.	Menurunnya pencemaran lingkungan	2.755.382.500,00	2.290.759.468,00	83,14
11.	Meningkatnya kualitas ruang publik	2.603.156.141,00	2.576.393.693,00	98,97
12.	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	14.059.771.792,00	12.475.498.048,00	88,73
13.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	2.535.889.500,00	2.425.186.310,00	95,63
14.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	9.488.950.616,00	2.712.043.436,00	61,38
15.	Meningkatnya status perkembangan desa	53.525.000,00	53.525.000,00	100,00
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	54.758.197.251,00	34.439.711.523,00	86,00
17.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	4.231.662.903,00	4.065.585.360,00	96,08



No.	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN	
			REALISASI (Rp)	%
18.	Meningkatnya investasi di daerah	235.970.000,00	227.725.000,00	96,51
19.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa	24.941.867.140,00	24.817.159.950,00	99,50
		293.686.941.534,00	222.486.025.034,00	75,76

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020, dapat diketahui dari besarnya anggaran yang dipergunakan untuk mencapai tiap - tiap sasaran kinerja atau sasaran strategis, sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.85
EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

No.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	
				REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1	99,76	21.667.236.784,00	68,23
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2	100,00	32.301.732.026,00	82,82
3.	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	1	112,78	47.506.250,00	99,93
4.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2	83,32	129.965.000,00	96,24
5.	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	4	100,66	81.073.232.186,00	88,97
6.	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	2	95,28	95.035.000,00	15,89
7.	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	2	80,66	0,00	0,00
8.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	--	974.940.000,00	98,50
9.	Menguatnya perekonomian rakyat	2	39,06	112.790.000,00	99,38
10.	Menurunnya pencemaran lingkungan	3	76,16	2.290.759.468,00	83,14
11.	Meningkatnya kualitas ruang publik	2	14,71	2.576.393.693,00	98,97
12.	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	3	69,72	12.475.498.048,00	88,73



No.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	
				REALISASI (Rp)	%
13.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	1	125,82	2.425.186.310,00	95,63
14.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	4	100,00	2.712.043.436,00	61,38
15.	Meningkatnya status perkembangan desa	1	95,79	53.525.000,00	100,00
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,00	34.439.711.523,00	86,00
17.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	3	72,91	4.065.585.360,00	96,08
18.	Meningkatnya investasi di daerah	1	530,48	227.725.000,00	96,51
19.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa	1	-	24.817.159.950,00	99,50
JUMLAH		37	111,68	222.486.025.034,00	75,76

Secara global dapat disimpulkan, bahwa penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2020, untuk mencapai sasaran kinerja, boleh dikatakan sudah efektif dengan rata - rata capaian kinerja 19 (Sembilan Belas) sasaran **111,68 %** atau mendapat predikat **SANGAT BERHASIL**, dengan rata - rata realisasi penggunaan anggaran **75,76 %**.

Untuk melihat seberapa jauh efisiensi penggunaan anggaran dalam konteks pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020, terutama yang pencapain kinerjanya 91 % hingga 100 % ke atas, dapat diketahui dengan melihat **kecenderungan pencapaian sasaran kinerja yang semakin tinggi, diperoleh dengan biaya yang seminimal mungkin**. Dengan kata lain, efisiensi dapat diartikan sebagai **optimalisasi penggunaan sumber - sumber dalam usaha mencapai tujuan organisasi**. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio *ouput* dengan *input* (**output / input**). Perlu disampaikan, bahwa dari **19 (sembilan belas)** sasaran yang telah ditetapkan, ada **2 (dua)** sasaran yang belum ada nilainya / datanya, sehingga jumlah sasaran yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan hanya **17 (tujuh belas)** sasaran saja.

Dalam konteks perhitungan efisiensi, dapat dilihat dari **17 (tujuh belas)** sasaran kinerja strategis, **10 (sepuluh)** diantaranya telah **memenuhi target** dan **melampaui target**, dengan capaian efisiensi sebesar **58,82 %** atau dengan perhitungan : (**10 / 17 x 100 %**), sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut :



Tabel 3.86
EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2020

NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1	99,76	68,23	68,39
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2	100,00	82,82	82,82
3.	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	1	112,78	99,93	88,61
4.	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	4	100,06	88,97	88,92
5.	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	2	95,28	15,89	16,68
6.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	1	125,82	95,63	76,01
7.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	4	100,00	61,38	61,38
8.	Meningkatnya kemandirian desa	1	95,79	100,00	104,40
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,00	86,00	86,00
10.	Meningkatnya investasi di daerah	1	530,48	96,51	18,19

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2020 dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja, boleh dikatakan **sudah efisien**, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat efisiensi yang mencapai **58,82 %** tersebut.



D. Prestasi dan Penghargaan

DAFTAR PRESTASI DAN PENGHARGAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

NO.	PENGHARGAAN
1.	Juara Ke-1 Lomba <i>Story Telling</i> U M K M pada (K O W A N I) Kongres Wanita Indonesia.
2.	Juara Ke-1 Jenjang Kepala Sekolah Menengah Pertama Berprestasi dalam Kegiatan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Dikdas Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
3.	Juara Ke-1 Jenjang Guru TK Berprestasi dalam Kegiatan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Dikdas Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.





BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, merupakan bukti tanggung jawab tertulis atas pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020. LKIP ini merupakan upaya untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP ini juga merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan sebanyak **19 (sembilan belas)** sasaran strategis dan **37 (tiga puluh tujuh)** Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran kinerja strategis, hanya **17 (tujuh belas)** sasaran strategis yang bisa diukur. Hal ini terjadi karena realisasi capaian indikatornya belum diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari 17 sasaran strategis tersebut, ada **4 (empat)** sasaran masuk katagori **sangat berhasil** atau **melampaui target**, dengan capaian rata - rata **di atas 100 %**. Ada **6 (enam)** masuk katagori **berhasil** atau **memenuhi target**, dengan rata - rata capaian **di atas 91 %**, ada **1 (satu)** sasaran masuk katagori **cukup berhasil** atau **mendekati target**, dengan capaian rata - rata **lebih dari 81 %** dan ada **6 (enam)** sasaran masuk katagori **kurang berhasil** atau **tidak memenuhi target**, dengan capaian rata - rata **kurang dari 81 %**. Ada **2 (dua)** sasaran dan **4 (empat)** indikator kinerja yang tidak dapat diukur karena datanya belum bisa diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, Kemendagri, BPK dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Diperkirakan data dimaksud baru bisa diterbitkan sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2020.



Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. **Sasaran 1**, terdiri dari **1** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata **99,76 %** atau **mencapai target**, dengan makna **berhasil**.
2. **Sasaran 2**, terdiri dari **2** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata **100,00 %** atau **mencapai target**, dengan makna **berhasil**.
3. **Sasaran 3**, terdiri dari **1** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **112,78 %** atau **melampaui target**, dengan makna **sangat berhasil**.
4. **Sasaran 4**, terdiri dari **2** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **83,32 %** atau **belum mencapai target**, dengan makna **cukup berhasil**.
5. **Sasaran 5**, terdiri dari **4** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **100,66 %** atau **melampaui target**, dengan makna **sangat berhasil**.
6. **Sasaran 6**, terdiri dari **2** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **95,28 %** atau **mencapai target**, dengan makna **berhasil**.
7. **Sasaran 7**, terdiri dari **2** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **80,66 %** atau **belum mencapai target**, dengan makna **kurang berhasil**.
8. **Sasaran 8**, terdiri dari **1** indikator kinerja, dengan nilai **belum bisa diukur** karena datanya belum diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. **Sasaran 9**, terdiri dari **2** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **39,06 %** atau **belum mencapai target**, dengan makna **kurang berhasil**.
10. **Sasaran 10**, terdiri dari **3** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **76,16 %** atau **belum mencapai target**, dengan makna **kurang berhasil**.
11. **Sasaran 11**, terdiri dari **2** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **14,71 %** atau **tidak mencapai target**, dengan makna **kurang berhasil**.
12. **Sasaran 12**, terdiri dari **3** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **69,72 %** atau **tidak mencapai target**, dengan makna **kurang berhasil**.
13. **Sasaran 13**, terdiri dari **1** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **125,82 %** atau **melebihi target**, dengan makna **sangat berhasil**.
14. **Sasaran 14**, terdiri dari **4** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **100,00 %** atau **mencapai target**, dengan makna **berhasil**.
15. **Sasaran 15**, terdiri dari **1** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **95,79 %** atau **mencapai target**, dengan makna **berhasil**.
16. **Sasaran 16**, terdiri dari **1** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **100,00 %** atau **mencapai target**, dengan makna **berhasil**.
17. **Sasaran 17**, terdiri dari **3** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **72,91 %** atau **tidak mencapai target**, dengan makna **kurang berhasil**.
18. **Sasaran 18**, terdiri dari **1** indikator kinerja, dengan nilai rata - rata sasaran **530,48 %** atau **melampaui target**, dengan makna **sangat berhasil**.
19. **Sasaran 19**, terdiri dari **1** indikator kinerja, dengan nilai **belum bisa diukur** karena datanya belum diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur.



Berdasarkan 17 (**tujuh belas**) sasaran strategis dan 31 (**tiga puluh satu**) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bisa diukur tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ada 4 (**empat**) sasaran kinerja atau **23,53 % melampaui target** atau **sangat berhasil**.
- b. Ada 6 (**enam**) sasaran kinerja atau **35,29 % memenuhi target** atau **berhasil**.
- c. Ada 1 (**satu**) sasaran kinerja atau **5,88 % mendekati target** atau **cukup berhasil**.
- d. Ada 6 (**enam**) sasaran kinerja atau **35,29 % tidak mencapai target** atau **kurang berhasil**.

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa secara umum rata - rata capaian sasaran kinerja tahun 2020 masuk katagori **SANGAT BERHASIL (111,68 %)**. Namun demikian, masih ada 6 (**enam**) **Sasaran Kinerja Strategis** dan ada 10 (**sepuluh**) **Indikator Kinerja Utama** yang capaiannya **belum optimal** atau **kurang berhasil**, sehingga perlu menjadi perhatian pada tahun - tahun berikutnya. Terhadap indikator - indikator kinerja yang belum memenuhi harapan akan diperbaiki, dievaluasi dan akan untuk dilakukan audit kinerja pada Dinas / Badan yang yang melaksanakannya.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan / memperbaiki capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum memenuhi harapan sebagai berikut :

1. Melakukan rapat evaluasi dan monitoring secara periodik (per kuartal / per semester), terhadap capaian indikator kinerja yang masuk predikat cukup berhasil dan kurang berhasil (oleh Tim Monev) dengan menghadirkan Perangkat Daerah / OPD pelaksana / penanggung jawab / penunjang sasaran.
2. Melakukan pemetaan (*mapping*) atas hasil monitoring dan evaluasi, untuk mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi penyebabnya, kendala - kendala yang dihadapi dan merumuskan berbagai solusinya serta menyiapkan rencana tindak lanjut atau rencana aksi.
3. Melaksanakan *roadshow* / turun ke lapangan ke Perangkat Daerah pelaksana, untuk mendalami hasil monev dan memastikan hasilnya.
4. Mengevaluasi kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, termasuk PK (Perjanjian Kinerja), apakah perlu direvisi / tidak perlu direvisi. Demikian juga dengan target terkait yang telah ditetapkan, apakah perlu dirubah atau tidak atau apakah sudah realistis.
5. Menggali dan mengkaji kembali kemungkinan dukungan pembiayaan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan kurang memadai atau harus ditambah atau barangkali tidak memerlukan biaya samasekali atau ada kebijakan yang berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja serta penggunaan sumberdaya lainnya.
6. Menggali dan mengkaji kembali apakah dana (Program / Kegiatan) yang telah digunakan Perangkat Daerah, telah tepat sasaran atau telah searah atau telah bersambung dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
7. Melakukan kunjungan, konsultasi intensif, asistensi serta Bimtek dengan fasilitator Kemenpan dan RB untuk meningkatkan kualitas SAKIP, terutama yang menyangkut kualitas IKU secara berjenjang dan terus menerus.



STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SAKIP KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	Kegiatan / Pembahasan	Waktu Pelaksanaan							
		April 2021				Mei 2021			
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Evaluasi internal dan monitoring capaian kinerja dan indikator kinerja Kuartal I								
2.	Pemetaan (Mapping) hasil evaluasi dan monitoring								



No	Kegiatan/Pembahasan	Waktu Pelaksanaan							
		Mei 2021				Juni 2021			
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Roadshow / ke lapangan / lokus / PD / OPD untuk memastikan hasil evaluasi dan monitoring								
4.	Mengevaluasi kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja								



No	Kegiatan/Pembahasan	Waktu Pelaksanaan							
		Juli 2021				Agustus 2021			
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Evaluasi internal dan monitoring capaian kinerja dan indikator kinerja kuartal II								
6.	Penggalan dan pengkajian program / kegiatan yang tepat sasaran								



		Waktu Pelaksanaan							
		Desember 2021				Januari 2022			
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Evaluasi internal dan monitoring capaian kinerja dan indikator kinerja Kuartal IV								
8.	Penyusunan LKIP Tahun 2021								

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUPIAN HADI, S.Ikom

Jabatan : BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sampit, 3 Pebruari 2020



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. SUPIAN HADI, S.Ikom.,ME

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,02
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,72
		2 Harapan lama sekolah	Tahun	12,62
3	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	Persentase angkatan kerja terampil/terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	%	34,58
4	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,93
		2 Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	0,009
5	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	1. Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,00
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	47,00
		3. Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	94,00
		4. Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	127
6	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	1. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	97,65
		2. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	93,00
7	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	1. Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	64,00
		2. Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	95,00
8	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	79,72
9	Menguatnya perekonomian rakyat	1. Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	9
		2. Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	3
10	Menurunnya pencemaran lingkungan	1. Indeks tingkat pencemaran air	Indeks	4,80
		2. Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	56,00
		3. Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	Indeks	66,70
11	Meningkatnya kualitas ruang publik	1. Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	80,62
		2. Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	ha	43,42
12	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	1. Persentase penurunan jumlah titik api	%	100
		2. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100
		3. Persentase jumlah desa siaga bencana	%	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
13	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	Rasio kemandirian fiskal daerah	%	13,13
14	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	1. Capaian implelementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	Memuaskan
		2. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB
		3. Opini BPK	Opini	WTP
		4. Nilai LPPD	Nilai	Baik
15	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Jumlah Desa	Sangat tertinggal : 47 Tertinggal : 60 Berkembang : 45 Maju : 13 Mandiri : 3
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik
17	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6,98
		2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	9,40
		3. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,61
18	Meningkatnya investasi di daerah	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	24,97
19	Meningkatnya pertumbuhan sektor	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	%	1,39

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Kalimantan Tengah Berkah	26.793.918.000,00	APBD
2	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	166.707.598,00	APBD
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	31.468.860.806,00	APBD
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	292.023.611,00	APBD
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	172.876.500,00	APBD
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	111.635.000,00	APBD
7	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangu	175.680.000,00	APBD
8	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	235.522.000,00	APBD
9	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	867.535.041,00	APBD
10	Program pembangunan jalan dan jembatan	1.155.563.557.705,00	APBD
11	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	174.000.000,00	APBD
12	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	411.346.000,00	APBD
13	Program Pembangunan Sanitasi	2.347.564.858,00	APBD
14	Program pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan	3.049.450.000,00	APBD
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	126.000.000,00	APBD
16	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	136.155.000,00	APBD
17	Program Pengembangan Usaha Tani	331.200.000,00	APBD
18	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	331.526.503,00	APBD
19	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	149.265.000,00	APBD
20	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.677.983.000,00	APBD
21	Program peningkatan pengendalian polusi	128.469.000,00	APBD
22	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.366.018.141,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
23	Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	350.000.000,00	APBD
24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	12.000.000,00	APBD
25	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2.108.819.056,00	
26	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	100.000.000,00	APBD
27	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.441.000,00	APBD
28	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.886.360.150,00	APBD
29	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	575.897.500,00	APBD
30	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	1.258.000.000,00	APBD
31	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	830.522.824,00	APBD
32	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	319.201.800,00	APBD
33	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	88.080.000,00	APBD
34	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	128.516.500,00	APBD
35	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.714.059.645,00	APBD
36	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.186.060.000,00	APBD
37	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.712.442.446,00	APBD
38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179.888.779,00	APBD
39	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.764.873.944,00	APBD
40	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	352.345.986,00	APBD
41	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.884.514.144,00	APBD
42	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	199.000.000,00	APBD
43	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.531.218.250,00	APBD
44	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.159.746.125,00	APBD
45	Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika	50.062.435,00	APBD
46	Program Peningkatan Kualitas SDM dan SDA Pertanian Berwawasan Lingkungan	39.229.000,00	APBD
47	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.425.191.000,00	APBD
48	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	10.235.514.509,00	APBD
49	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	235.970.000,00	APBD
50	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	121.800.000,00	APBD
51	Program pengembangan pemasaran pariwisata	63.585.000,00	APBD
52	Program pengembangan destinasi pariwisata	24.821.397.700,00	APBD

Sampit, 3 Februari 2020


BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. SUPIAN HADI, S.Ikom.,ME

**PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	70,02	69,85	99,76
Capaian Rata-Rata						99,76
2.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Rata - rata lama sekolah	Tahun	8,72	8,72	100,00
		2. Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	12,62	100,00
Capaian Rata-Rata						100,00
3.	Meningkatnya kualitas SDM angkatan kerja	1. Persentase angkatan kerja terampil/terdidik terhadap jumlah angkatan kerja	%	34,58	39,00	112,78
Capaian Rata-Rata						112,78
4.	Meningkatnya kualitas pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,93	87,91	99,98
		2. Prevalensi kekerasan terhadap anak-anak	%	0,009	0,006	66,67
Capaian Rata-Rata						83,32
5.	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan	1. Persentase jalan dalam kondisi baik	%	50,00	50,93	101,86
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	47,00	46,82	99,62
		3. Konektifitas jalan darat dari desa ke Ibukota Kecamatan	%	94,00	92,86	98,79
		4. Jumlah kecelakaan lalu lintas	Jumlah	127	130	102,36
Capaian Rata-Rata						100,66
6.	Meningkatnya rasio keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	1. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	97,65	96,10	98,41
		2. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	93,00	85,70	92,15
Capaian Rata-Rata						95,28
7.	Meningkatnya infrastruktur sosial yang berkualitas	1. Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	%	64,00	45,72	71,44
		2. Persentase masyarakat yang terlayani air bersih	%	95,00	85,39	89,88
Capaian Rata-Rata						80,66
8.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1. Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	79,72	N/A**	-
Capaian Rata-Rata						-
9.	Menguatnya perekonomian rakyat	1. Persentase pertumbuhan usaha (UMKM -IKM) baru atau Jumlah Usaha Baru	%	9	6,61	73,44
		2. Persentase usaha kemasyarakatan yang meningkat statusnya	%	3	0,23	7,67
Capaian Rata-Rata						40,56
10.	Menurunnya pencemaran lingkungan	1. Indeks tingkat pencemaran air	Indeks	4,80	3,33	69,38
		2. Persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	%	56,00	54,00	96,43
		3. Tingkat kualitas udara ambient titik pantau sesuai baku mutu (IPU)	Indeks	66,70	41,80	62,67
Capaian Rata-Rata						76,16
11.	Meningkatnya kualitas ruang publik	1. Persentase RTH kota dengan kondisi baik	%	80,62	11,86	14,71
		2. Luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK Bupati	ha	43,42	-	-
Capaian Rata-Rata						14,71

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
12.	Menurunnya tingkat risiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan permukiman	1.	Persentase penurunan jumlah titik api	%	100	100	100,00
		2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	95	95,00
		3.	Persentase jumlah desa siaga bencana	%	100	14,16	14,16
Capaian Rata-Rata							69,72
13.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan	1.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	%	13,13	16,52	125,82
Capaian Rata-Rata							125,82
14.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	1.	Capaian implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Kategori	Memuaskan	Memuaskan	100,00
		2.	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	BB	-	-
		3.	Opini BPK	Opini	WTP	-	-
		4.	Nilai LPPD	Nilai	Baik	-	-
Capaian Rata-Rata							100,00
15.	Meningkatnya kemandirian desa	1.	Jumlah desa berdasarkan kategori IDM (Indeks Desa Membangun)	Jumlah Desa	Sangat tertinggal : 47 Tertinggal : 60 Berkembang : 45 Maju : 13 Mandiri : 3	Sangat tertinggal : 27 Tertinggal : 65 Berkembang : 59 Maju : 15 Mandiri : 2	95,79
Capaian Rata-Rata							95,79
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Baik	Baik	100
Capaian Rata-Rata							100,00
17.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	6,98	3,86	55,30
		2.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	9,40	5,11	54,36
		3.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,61	9,39	109,06
Capaian Rata-Rata							72,91
18.	Meningkatnya investasi di daerah	1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi	%	24,97	132,46	530,48
Capaian Rata-Rata							530,48
19.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa	1.	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	%	1,39	N/A**	-
Capaian Rata-Rata							-
Capaian Rata-Rata Kinerja							111,68